

SKRIPSI

**PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL DALAM
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DI KECAMATAN WEWEWA SELATAN KABUPATEN
SUMBA BARAT DAYA PROPINSI NTT.**



Disusun oleh

MARTIN SANGU

45 10 021 032

**Jurusan Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Bosowa Makassar
2017**

HALAMAN PENGESAHAN

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa 45

Makassar yang tersebut di bawah ini :

Nama : Martin Sangu

Nomor stambuk : 4510021032

Jurusan : Administrasi Negara

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Judul : *“Pengelolaan pasar Tradisional Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dikecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur”*

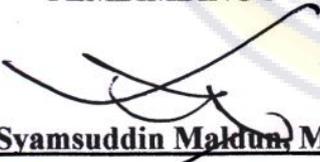
Telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti Ujian Skripsi pada jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universtas Bosowa 45 Makassar

Makassar , 01 Juni 2016

Menyetujui ;

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Dr. Syamsuddin Maldun, M.Pd


Nining Haslinda, S.sos, M.si

Mengetahui ;

DEKAN FAK. ILMU SOSIAL &
ILMU POLITIK



Arief Wicaksono, S.ip, MA

KETUA JURUSAN
ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Drs. Natsir Tompo, M.Si

HALAMAN PENERIMAAN

Hari Kamis, tanggal 27 November 2017

Judul Skripsi : Pengelolaan Pasar Tradisional dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya Propinsi NTT.

Nama : Martin Sangu

Nomor Stambuk : 4510021032

Jurusan : Ilmu Administrasi

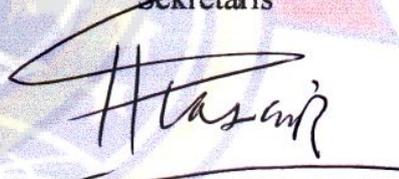
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Telah diterima Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana ilmu sosial (S.Sos) pada Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar

Panitia Ujian :

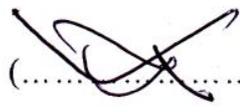
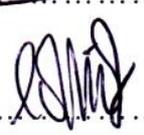
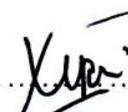
Ketua

Arif Wicaksono, S.Ip., M.A
Dekan Fisip
Universitas Bosowa Makassar

Sekretaris

Drs. Natsir Tompo, M.Si
Ketua Jurusan Administrasi Negara
Universitas Bosowa Makassar

Tim Penguji :

1. Drs. Natsir Tompo, M.Si
2. Dr. Syamsuddin Maldun, M.Pd
3. Nining Haslinda, S.Sos., M.Si
4. Dr. Dra. Hj. Normi Nonci, M.Si


(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Kata Pengantar

Puji dan rasa syukur yang mendalam peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa karena berkat limpahan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi yang berjudul "*Pengelolaan pasar Tradisional Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dikecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur*" ini kami susun untuk memenuhi persyaratan kurikulum sarjana strata-1 (S-1) pada Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa Makassar.

Peneliti mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya atas semua bantuan yang telah diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung selama penyusunan proposal ini hingga selesai. Secara khusus rasa terimakasih tersebut kami sampaikan kepada:

1. Prof. **Dr. Mh. Saleh Palu M. Eng**, Selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar
2. Bapak **Arief Wicaksono, S.ip, MA** Selaku Dekan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu politik Universitas Bosowa Makassar.
3. Bapak **Dr. Syamsuddin Maldun, M.pd** dosen pembimbing I dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Ibu **Nining Haslinda, S.sos, M.si** selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan dorongan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak **Drs. Natsir Tompo, M.Si.** selaku Penasehat Akademik sekaligus Ketua Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa Makassar.
6. Seluruh **Dosen dan Karyawan** Jurusan Administrasi Negara, Universitas Bosowa Makassar, atas ilmu, bimbingan dan bantuannya hingga peneliti selesai menyusun skripsi ini.
7. Bapak **Heribertus Sangu dan Ibu Theresia**, orang tua tercinta, yang telah membesarkan dan mendidik, serta memberikan dukungan dan doa kepada peneliti.
8. Rekan-rekan di Jurusan Administrasi Negara, Universitas Bosowa Makassar yang juga telah banyak membantu peneliti.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dalam penyempurnaan Skripsi ini.

Terakhir peneliti berharap, semoga Skripsi ini dapat memberikan hal yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembaca dan khususnya bagi peneliti sendiri.

Makassar, Oktober 2017

Peneliti,

(Martin Sangu)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pengelolaan	13
B. Pengertian Pasar	15
C. Pengertian kesejahteraan.....	18
D. Kerangka konsep.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe dan Dasar Penelitian	26
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian	26
C. Sumber Data.....	26
D. Informan Penelitian.....	27
E. Instrumen Penelitian.....	29
F. Teknik Pengumpulan Data.....	29
G. Teknik Analisis Data.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran umum Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah di Kab. Sumba barat Daya.....	31

B. Peran Dinas Pendapatandan Pengelolaan Aset Daerah di Kab. Sumba baratDaya.....	34
Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Asset Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya	
a. Cakupan Kegiatan/ Wilayah Pelayanan Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Asset Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya.....	48
b. Sumber Daya Pendukung Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Asset Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya.....	49
c. Model pengembangan pasar tradisional Kabupaten Sumba Barat Daya.....	61

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Krisis ekonomi dan kepercayaan yang melanda Indonesia memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Di satu sisi, krisis tersebut telah membawa dampak yang luar biasa pada tingkat kemiskinan, namun di sisi lain, krisis tersebut dapat juga memberi berkah tersembunyi bagi upaya peningkatan taraf hidup seluruh rakyat Indonesia di masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan krisis ekonomi dan kepercayaan yang dialami telah membuka jalan bagi munculnya reformasi total di seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia.

Di samping itu, sejak dikeluarkannya Undang-Undang RI No.32 tahun 2004 yang telah direvisi oleh Undang-Undang No.12 tahun 2008 selanjutnya menagalami revisi yang terakhir di tahun 2014 hingga saat ini, yaitu Undang-undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang isinya mengatur tentang pemberian wewenang kepada daerah untuk mengembangkan potensi dan mengelola potensi yang dimiliki oleh daerahnya sendiri, memberikan wewenang penuh pada Pemerintah Daerah untuk mengembangkan daerahnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerahnya salah satu contoh misalnya Pasar tradisional atau pasar Desa. Apalagi dengan di keluarkannya Peraturan Menteri dalam negeri nomor 42 tahun 2007 tentang pengelolaan pasar desa. Dalam Pasal 1, Poin 10 menyatakan bahwa: Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola

oleh pemerintah, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat setempat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda, atau nama lain sejenisnya, yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil menengah, dengan skala usaha kecil dan model kecil, dengan proses jual beli melalui tawar menawar

Sesuai Peraturan Menteri dalam negeri No. 42 Tahun 2007 tentang pengelolaan pasar desa pada saat ini Pemerintah Daerah baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan bidang tugas masing-masing melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Dalam rangka pembinaan Pasar Tradisional, Pemerintah Daerah:

- a. Mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Tradisional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Tradisional;
- c. Memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Tradisional;
- d. Mengevaluasi pengelolaan Pasar Tradisional.

Ekonomi merupakan aspek penting yang dapat menunjang kemajuan suatu bangsa. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menumbuhkan dan memajukan sektor ekonomi baik sektor formal maupun informal, untuk memperhatikan pemerataan pendapatan bagi warga negaranya. Kemajuan di bidang ekonomi juga dipengaruhi oleh kemajuan teknologi seiring perubahan

zaman yang terasa cepat. Apabila menengok sejarah peradaban manusia, pada awalnya kegiatan ekonomi berupa transaksi antara pedagang dan pembeli yang dilakukan secara barang tukar barang (barter) yaitu kegiatan ekonomi dengan melakukan transaksi barang dengan barang guna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Barang tukar barang sendiri mulai ditinggalkan sejak munculnya mata uang yang digunakan sebagai alat ukur pembayaran baik barang maupun jasa. Perkembangan ekonomi sangat erat kaitannya dengan perkembangan zaman dengan ditandai munculnya era globalisasi yang merambah pada dunia bisnis dan perdagangan. Dengan demikian maka, dibangunlah tata kota lengkap dengan sarana dan fasilitas penunjang guna untuk memudah akses dalam kehidupan sehari-hari. Pasar merupakan salah satu sarana ekonomi yang menjadi tolak ukur dalam peningkatan pendapatan ekonomi di daerah. Apabila dikhususkan ke daerah Kecamatan, pasar adalah satu-satunya tempat dimana transaksi ekonomi berlangsung.

Pasar tradisional merupakan tempat menilai tingkat perekonomian masyarakat di desa kecamatan, dan seyogyanya kesejahteraan masyarakat merupakan tingkat tertinggi keberhasilan pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparatur yang bekerja untuk rakyat. Dalam pembangunan dan pengembangan pasar tradisional di daerah-daerah kecamatan, bahkan di Desa menjadi penting untuk diteliti. Adapun faktor yang menjadi penimbang yaitu pengukuran jumlah penduduk untuk mengetahui substansi kebutuhan masyarakat setempat, agar pembangunan sarana pasar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Tujuan utama pelaksanaan pengembangan pasar tradisional adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat, salah satu upaya dalam mencapai hal tersebut dengan mengembangkan pasar tradisional yang mulai tidak layak digunakan karena pengembangan adalah awal dari pemberdayaan sarana fasilitas pemerintah dan masyarakat. Jika masyarakat makin merasa puas dengan tindakan pengembangan pasar yang dilakukan pemerintah daerah maka masyarakat akan memberikan kepercayaan kepada pemerintah, begitupun sebaliknya pemberdayaan fasilitas sarana ekonomi khususnya pasar tradisional merupakan salah satu pilar dalam terciptanya good governance.

Peran Pemerintah Daerah merupakan hal mutlak yang menjadi tolak ukur berlangsungnya pembangunan pasar tradisional, karena dalam paradigma good governance pemerintah daerah mempunyai peran penting dalam membangun daerahnya sendiri. Pasar Tradisional dalam sebuah daerah merupakan sarana yang menjadi tolak ukur mutlak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di daerah-daerah kecamatan yang jauh dari pusat kota yang perkembangan ekonomi masyarakatnya melonjak dengan cepat. Kepedulian Pimpinan Daerah dan Para Pejabat di bawahnya terhadap pasar tradisional menentukan kebijakan dan bentuk organisasi dari instansi (SKPD) yang membidangi pasar tradisional di daerahnya. Di beberapa daerah, pimpinan daerah meletakkan posisi pasar semata-mata sebagai salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi yang dipungut dari para pedagang. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh Pimpinan Daerah (Bupati/Walikota) dan Pejabat Daerah di tingkat bawahnya (Kepala

SKPD) lebih menekankan pada hal-hal yang berkaitan dengan optimalisasi pemungutan retribusi pasar, seperti Pengaturan Pemungutan dan Penyetoran Retribusi serta Administrasi Keuangan (pembukuan) Retribusi semata daripada penekanan pada pembinaan pasar termasuk di dalamnya pembinaan para pengelola pasar dan pedagang pasar. Akibat dari adanya kebijakan optimalisasi pemungutan retribusi tersebut, maka kepada para Kepala Pasar diberikan target-target yang untuk mencapainya pasar diusahakan sedemikian rupa agar dapat menampung pedagang dalam jumlah sebanyak mungkin, termasuk mengisi sebagian tempat-tempat kosong seperti tangga dan lorong-lorong pasar yang seharusnya dibiarkan tetap kosong tanpa pedagang agar para pengunjung tetap nyaman berlalu lalang.

Dalam situasi di mana peran pasar lebih ditekankan sebagai salah satu penghasil PAD, maka di beberapa daerah mendudukan pasar tradisional di bawah Dinas Pendapatan Daerah (DINPENDA). Karena kompetensi utama DINPENDA adalah penghimpun PAD, maka sudah barang tentu SKPD ini tidak memiliki kompetensi sebagai pembina pasar tradisional. Pembinaan para pedagang pasar biasanya diserahkan kepada dinas (SKPD) yang membidangi perdagangan, koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Model pembinaan yang melibatkan dua SKPD ini biasanya sulit berjalan dengan baik, mengingat masalah koordinasi di antara dua SKPD tersebut. Di sini SKPD pembina pedagang pasar ketika melakukan pembinaan harus merasuk ke dalam unit kerja pasar tradisional yang secara keorganisasian berada di bawah kewenangan DINPENDA, namun ada beberapa hal yang perlu

menjadi perhatian khusus di dalam pengelolaan pasar agar masyarakat pun merasa keterlibatan pemerintah sebagai pengelola dapat memberikan dampak positif yang tentunya sesuai dengan keinginan atau harapan masyarakat yaitu Penyelenggaraan, perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan bahkan penataan pasar modern, dan harusnya dilaksanakan berdasarkan atas asa

s:

1. Kemanusiaan ;
2. Keadilan ;
3. Kasamaan kedudukan ;
4. Kemitraan ;
5. Ketertiban dan kepastian hukum ;
6. Kelestarian lingkungan ;
7. Kejujuran usaha dan
8. Persaingan sehat (fairness).

Dalam (Surat Kabar, Umma Kalada 2016). Jalan raya di Pasar Wee wulla, Kecamatan Wewewa Selatan, kabupaten Sumba Barat Daya, NTT yang merupakan jalan Provinsi dijadikan tempat jualan para pedagang sayur, lombok, beras, dan barang kebutuhan lainnya. Pilihan para penjual ini dilakukan karena kondisi pasar tersebut sangat memprihatinkan.

Karena itu butuh perhatian pemerintah untuk menata kembali Pasar Wee Wulla. Kepala Dinas Perhubungan Sumba Barat Daya Yohanes Tende kepada Umma Kalada, Rabu (23/7) menuturkan, pihaknya, bersama Pemerintah

setempat sudah melakukan pendekatan dengan para pedagang untuk tertib di Pasar Wee Wulla.

“Namun mereka (para pedagang) tidak mengindahkan imbauan kami,” ujarnya. Perlakuan para penjual ini menurutnya didukung oleh PD Pasar yang terus memungut retribusi dari para pedagang nakal tersebut. “Mereka tetap berjualan karena mereka menganggap bahwa mereka tetap dipungut biaya retribusi oleh pemerintah,” tandasnya.

Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Daerah, Perdagangan, dan UKM Kabupaten Sumba Barat Daya Drs. Sakarias Natara S.Sos,M.si ketika dikonfirmasi 14 April 2016 mengungkapkan kondisi Pasar Wee wulla, saat ini sangat tidak layak karena sudah tidak mampu menampung para pedagang, hal ini membuat para pedagang berjualan di jalan raya. Untuk mengatasi hal ini, kata dia, pihaknya sedang membangun pasar baru yang diperkirakan akan beroperasi pada awal tahun 2017. Margarheta Lende, penjual lombok di Pasar Wee wulla mengaku, dia terpaksa berjualan di jalan raya karena area di dalam pasar tidak layak lagi untuk berjualan. Selama ini, menurutnya tidak ada perhatian pemerintah terhadap pasar tersebut, padahal setiap hari mereka harus membayar retribusi sebesar Rp 5.000. Leda Kasa, penjual beras, menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten SBD jangan salahkan masyarakat yang berjualan di jalan raya karena area bagian dalam pasar tidak pernah diperbaiki. Pantauan Umma kalada, area dalam Pasar Wee wulla kosong. Penjual lebih memilih jalan raya untuk berjualan. (mbr/C-1)

Peneliti berkesimpulan bahwa, kesulitan dalam melakukan koordinasi ini sudah menjadi sesuatu hal yang lumrah karena kentalnya ego sektoral yang berdampak tidak adanya Senergitas antara SKPD sehingga lahirnya sikap Apatis pada lembaga yang berkewenangan mengatur, menata dan mengelola pasar Tradisional tersebut. Masalah ini menjadi salah satu sebab munculnya stigma buruk yang melekat pada pasar tradisional sehingga tidak menarik untuk dikunjungi oleh masyarakat konsumen. Penulis berpendapat bahwa:

“Pemahaman akan Tugas dan tanggungjawab yang dibebankan, adalah sesuatu yang wajib di sadari oleh aparatur pemerintah. Sebab Adanya suatu pekerjaan merupakan kegiatan yang telah direncanakan dalam sebuah organisasi pemerintahan. Tanpa organisasi pemerintahan, tidak mungkin seseorang dapat pekerjaan. Pekerjaan yang dimaksud disini adalah tugas yang diberikan atasan kepada bawahan sebagai tanggungjawab suatu jabatan/ bidang dalam organisasi pemerintahan.

Selain itu dalam melakukan tugas sebagai tanggungjawab dalam jabatan organisasi pemerintahan. Harus disadari bahwa setiap bidang dalam organisasi pemerintahan harus memiliki garis koordinasi dan kerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Dimana kita ketahui bersama bahwa Fungsi kerja adalah melakukan pekerjaan sesuai dengan jabatannya, Sebab Setiap jabatan dalam organisasi mempunyai fungsi kerja yang berbeda-beda yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Namun harus diketahui bahwa dalam organisasi perlu adanya kerja sama. Kerja sama ini dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Fungsi menunjukkan

makna dari pekerjaan yang telah dan akan dilakukan. Dalam organisasi fungsi kerjabenar-benar sangat diperlukan. Hal ini sangat mempengaruhi keberhasilan dalam suatu kegiatan atau tujuan organisasi”

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa tugas adalah pekerjaan seseorang dalam organisasi pemerintahan atas pemberian jabatan. Sehingga dalam melakukan tugasnya, seseorang perlu memahami tugas dan fungsi kerja dalam jabatan tersebut. Inilah kondisi yang terbalik yakni ketidakpahaman soal tugas dan tanggung jawab serta kurangnya kerja sama atau sinergitas dalam proses pengelolaan pasar yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat pedagang maupun pembeli demi tercapainya kestabilan ekonomi yang merata. Berbicara kesejahteraan masyarakat, beratri aspek ekonomi menjadi ujung tombak dalam mengukur sejauh mana relevansinya antara teori ekonomi dan implementasinya yang berlangsung dilapangan. Kondisi ini didukung oleh teorinya Adam Smith yang mengatakan bahwa: Ilmu Ekonomi merupakan ilmu dengan cara sistematis yang mempelajari mengenai seluk-beluk tingkah laku manusia di dalam usahanya guna mengalokasikan berbagai sumber daya terbatas atau tak terbatas untuk tercapainya tujuan-tujuan tertentu dalam kehidupannya.

Ilmu Ekonomi adalah pada dasarnya ilmu sosial karena objek penelitian dan pembahasannya adalah manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian ilmu ekonomi merupakan perpaduan ilmu sosial dan eksakta yaitu ilmu ekonomi dan terapan, di antaranya ilmu ekonomi mikro dan makro.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Ruang lingkup pengelolaan pasar tradisional cukup luas, maka batasan dan rumusan masalah ini penulis maksudkan agar lebih mempertegas ruang lingkup kajian tentang Pengelolaan pasar Tradisional. Untuk mencegah meluasnya permasalahan yang ada agar lebih terarah maka dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian di lakukan pada pasar tradisional Wee wulla, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya.
2. Penelitian ini difokuskan pada tata kelola pasar tradisional Wee wulla, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran pemerintah (SKPD) dalam proses pengelolaan pasar tradisional Wee Wulla, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT ?
2. Apa faktor penghambat dan faktor pendukung dalam proses pengelolaan pasar tradisional Wee Wulla, Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT ?
3. Bagaimana model pengembangan pasar tradisional Wee Wulla, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses dengan metode ilmiah untuk dapat menemukan, mengembangkan serta menguji kebenaran ilmu. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui proses pengelolaan pasar tradisional Wee Wulla dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT.
- b. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan pasar tradisional Wee Wulla, Kecamatan Wewewa, Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT.
- c. Mengetahui model pengembangan pasar tradisional Wee Wulla, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT.

2. Manfaat penulisan

a. Manfaat praktis

Hasil karya tulis ini diharapkan dapat membuka dan menambah wawasan serta memperbanyak informasi mengenai fenomena pengaruh pasar tradisional dalam perekonomian Indonesia.

b. Manfaat teoritis

Bagi kalangan akademisi, karya tulis ini diharapkan dapat memperkaya dan memberikan sumbangan wacana konseptual bagi pengembangan kajian teori dan kebijakan ekonomi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Manajemen

Dalam proses kehidupan Manusia tentu melalui pengaturan dan tata kelola yang efektif dan efisien sejalan dengan pendapat Menurut James A.F. Stoner dalam buku manajemen (1995:34) Manajemen adalah tata kelola dalam proses penyelenggaraan, pengurusan atau proses membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi. Pengolaan sama halnya dengan manajemen, karena pengelolaan dalam sebuah organisasi memerlukan pelaksanaan tanggung jawab manajerial secara terus menerus. Tanggung jawab tersebut secara kolektif sering disebut sebagai fungsi manajemen. Manajemen dalam organisasi pada dasarnya dimaksudkan sebagai suatu proses (aktivitas) penentuan dan pencapaian tujuan melalui pelaksanaan empat fungsi dasar yakni : Planning, organizing, actuating dan controlling dalam penggunaan sumber daya organisasi, manajemen memerlukan koordinasi sumber daya manusia dan material ke arah tercapainya tujuan. Untuk memperjelas arti manajemen, dibawah ini kutipan pendapat beberapa pakar di bidang manajemen antara lain :

1. Manajemen menurut George. Terry 1986:19 dalam bukunya *Prinsip-prinsip Manajemen*, merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.

1. Manajemen menurut Winslow Taylor 1911 dalam bukunya yang berjudul *Principles of Scientific Management*. Dalam bukunya itu, Taylor mendeskripsikan bahwa manajemen adalah seni yang ditentukan untuk mengetahui dengan sungguh-sungguh apa yang dikehendaki menyuruh orang mengerjakan sesuatu dengan yang sebaik-baiknya dan dengan cara yang semudah-mudahnya. Manajemen memerlukan koordinasi sumber daya manusia dan material kearah tercapainya tujuan. Definisi yang lazim mengemukakan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian dan kegiatan pengawasan dalam pencapaian tujuan. Manajemen adalah kunci dalam sistem organisasi karena tanpa manajemen, semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Ada tiga alasan utama diperlukan manajemen :
 - a) Manajemen sangat dibutuhkan untuk mencapaitujuan organisasi dan pribadi.
 - b) Untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan yang sering bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi.
 - c) Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas kerja.

Efisiensi dan efektivitas suatu pekerjaan seseorang, dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda-beda, salah satu cara yang umum adalah produktivitas kerja. Berkaitan dengan aktivitas pengelolaan, seorang manajer dituntut untuk mampu melaksanakan berbagai kegiatan yang

menjaditanggung jawabnya, tak terkecuali dalam hal pengelolaan Pasar tradisional. Mengingat pasar merupakan salah satu unsur sumber penghidupan masyarakat, maka konsentrasi yang penuh dalam pengelolaannya perlu untuk dilakukan. Oleh karenanya, pengelola dalam tubuh organisasi merupakan salah satu hal yang terpenting dalam upaya mewujudkan semua hal agar menjadi lebih baik.

B. Pengertian Pasar

Menurut Handri Ma'aruf (2005) kata "pasar" memiliki tiga pengertian, yaitu:

1. Pasar dalam arti "tempat", yaitu tempat bertemunya para penjual atau produsen dengan pembeli atau konsumen.
2. Pasar dalam arti "interaksi permintaan dan penawaran", yaitu pasar sebagai tempat terjadinya transaksi jual beli.
3. Pasar dalam arti "sekelompok anggota masyarakat yang memiliki kebutuhan dan daya beli ". Pengertian ini merujuk pada dua hal, yaitu kebutuhan dan daya beli. Jadi pasar adalah orang-orang yang menginginkan sesuatu barang atau jasa dan memiliki kemampuan untuk membeli.

Pasar merupakan satu institusi sebagai arena praktek transaksi ekonomi berlangsung, dan telah ada sejak manusia mulai mengenal pertukaran dalam pemenuhan hidupnya. Seiringan dengan perkembangan yang dialami masyarakat, pasar mengalami perkembangan hingga saat

ini. Pasar Tradisional merupakan ajang transaksi komoditas kebutuhan subsisten yang prosesnya dan modelnya masih diwarnai dengan ekonomi pedesaan dengan tradisi-tradisi lama dengan aktor pedagang tradisional (subsistent economy). Pasar serupa ini termasuk dalam kategori sektor ekonomi informal.

Biasanya pasar tradisional umumnya menyediakan berbagai macam bahan pokok keperluan rumah tangga, dan pasar ini biasanya berlokasi di tempat yang terbuka. Bangunan di pasar ini berbentuk toko dan los. Toko semi permanen umumnya digunakan untuk berjualan aneka kue, pakaian, dan barang atau perabotan lainnya. Adapun los-nya yang digunakan untuk berjualan buah-buahan, sayuran, ikan, daging dan sebagainya. Penerangan di pasar tradisional secukupnya, dan tidak ber-AC. Kebersihan juga kadang kurang terjaga, seperti sampah banyak berserakan dan bertumpukan sehingga sering menimbulkan bau. Akibatnya jika turun hujan, akan becek dan kotor. Tapi semakin kesini kebersihan di pasar tradisional mulai di tingkatkan, bahkan sekarang ada pasar tradisional yang rapih dan bersih sehingga nyaman untuk dikunjungi.

Dalam pengertian sempit, pasar dapat didefinisikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli yang saling melakukan transaksi jual beli. Di dalam pasar lah kegiatan transaksi tawar menawar maupun jual beli terjadi. Di bawah ini pendapat beberapa ahli sebagai berikut :

1. *Kotler dan Amstrong (1999)* mendefinisikan pasar adalah seperangkat pembeli aktual dan potensial dari sebuah produk atau jasa. Ukuran dari

pasar sendiri tergantung pada jumlah orang yang menunjukkan kebutuhan, memiliki kemampuan dalam pertukaran.

2. Adapun pengertian pasar menurut William J . Stanton pada tahun 1993 menyatakan bahwa pasar adalah tempat dimana terdapat segerombol orang yang ingin membelanjakan uangnya. Atau dapat dikatakan bahwa pasar adalah tempat untuk kegiatan jual beli dengan alat pertukaran (uang).
3. Banyak pemasar memandang penjual sebagai industri dan pembeli sebagai pasar, dimana penjual mengirimkan produk dan jasa yang mereka produksi dan mengkomunikasikan atau menyampaikannya kepada pasar ; sebagai gantinya, mereka akan menerima uang dan informasi dari pasar (Kotler dan Amstrong ,1999).

Tradisional berasal dari bahasa latin adalah “Traditum” yang meliputi makna Menular misalnya mewarisi sesuatu dari generasi satu ke generasi berikutnya. Sederhananya tradisional dapat didefinisikan sebagai sebuah budaya lama yang telah diturunkan dari bekas (praktek budaya kuno).

1. Menurut Kbbi: tradisional/*tra·di·si·o·nal/ a1* sikap dan cara berpikir serta bertindak yang selalu berpegang teguh pada norma dan adat kebiasaan yang ada secara turun-temurun
2. Herman Malano. Gramedia Pustaka Utama, (2011 – 307).dalam bukunya “Selamatkan Pasar tradisional” Pasar tradisional adalah pasar yang pelaksanaanya bersifat tradisional tempat bertemunya penjual dan

pembeli, terjadinya kesepakatan harga dan terjadinya transaksi setelah melalui proses tawar menawar.

Pasar tradisional bergerak pada sektor informal, sehingga siapa saja memiliki peluang untuk mendapatkan pekerjaan di pasar ini, karena tidak dibutuhkan syarat-syarat khusus untuk dapat memperoleh pekerjaan disini, tidak seperti pada kegiatan perkantoran atau disebut dengan sektor formal dimana banyak syarat yang harus dipenuhi untuk dapat diterima kerja misalnya mengenai tingkat pendidikan yang dibutuhkan seperti pendidikan SMU sederajat atau bahkan tamatan Sarjana, sedangkan di sektor informal seperti pasar tradisional ini, dimana semua masyarakat yang mempunyai kemauan yang keras, keuletan dan modal yang cukup dalam merintis usaha dari yang kecil terlebih dahulu, bahkan bukan hanya sebagai pedagang saja tetapi banyak lagi kesempatan kerja yang ditawarkan di sektor informal ini seperti menjadi penjaga atau karyawan di toko maupun kios dari para pedagang yang membutuhkan jasa pekerja, kuli panggul dan lain sebagainya yang tidak terlepas dari kegiatan di pasar tradisional.

C. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan sosial adalah mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai tingkat kehidupan masyarakat yang lebih baik, sedangkan menurut rumusan Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial pasal 2 ayat 1, adalah:

1. “Kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketenteraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila”.
2. Salah satu ciri ilmu kesejahteraan sosial adalah upaya pengembangan metodologi untuk menangani berbagai macam masalah sosial, baik tingkat individu, kelompok, keluarga maupun masyarakat (Adi, 1994: 3-5). Pengertian Kesejahteraan Sosial menurut beberapa Ahli :

- a. Isbandi Rukminto Adi

Dalam bukunya Kesejahteraan Sosial (2013): Kesejahteraan sosial adalah suatu sistem yang terorganisir dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bermaksud untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai standar-standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan, serta hubungan-hubungan perorangan dan sosial yang memungkinkan mereka memperkembangkan segenap kemampuan dan meningkatkan kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga maupun masyarakat. Adapun menurut

b. Alfred J.Khan

Kesejahteraan sosial terdiri dari program-program yang tersedia selain yang tercakup dalam kriteria pasar untuk menjamin suatu tindakan kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan kesejahteraan, dengan tujuan meningkatkan derajat kehidupan komunal dan berfungsinya individual, agar dapat mudah menggunakan pelayanan-pelayanan maupun lembaga-lembaga yang ada pada umumnya serta membantu mereka yang mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan mereka (Sumarnonugroho,1987:28-35).

D. Kerangka Konseptual

Kabupaten Sumba Barat Daya telah mendudukan DISPENDA sebagai lembaga yang mengelola aset daerah dalam rangka pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah. DISPENDA adalah penghimpun PAD, maka sudah barang tentu SKPD ini tidak memiliki kompetensi sebagai pembina pasar tradisional. Pembinaan para pedagang pasar biasanya diserahkan kepada dinas (SKPD) yang membidangi perdagangan, koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Model pembinaan yang melibatkan dua SKPD ini biasanya sulit berjalan dengan baik, mengingat masalah koordinasi di antara dua SKPD tersebut. Di sini SKPD pembina pedagang pasar ketika melakukan pembinaan harus merasuk ke dalam unit kerja pasar tradisional yang secara keorganisasian berada di bawah kewenangan DISPENDA.

Pengelolaan, penataan dan pemberdayaan pasar tradisional yang terkesan kurang di fokuskan oleh pemerintah telah menjadi masalah pada

aspek Ekonomi Kerakyatan di tambah merebaknya pasar modern.Keberadaan pasar modern memang memberikan kemudahan kepada masyarakat konsumen namun juga sekaligus menjadi ancaman bagi pedagang pada pasar tradisional karna bagaimanapun juga pasar tradisional lebih menggambarkan denyut nadi perekonomian rakyat kecil. Banyak orang yang menggantungkan hidupnya dari mulai berdagang atau pedagang kecil , kuli panggul , pedagang asongan , hingga tukang ojek. Mereka bekerja di sana untuk memenuhi kehidupan anak serta keluarganya disana.

Survey AC Nielsen pada tahun 2009 menyebutkan bahwa 93% konsumen sudah menjadikan kegiatan belanja sebagai salah satu mode rekreasi mereka.Model yang mereka cari adalah tempat yang memberi keleluasaan untuk berbelanja semua kebutuhan mereka (one stop shopping). Kondisi ini tentu akan semakin meminggirkan peran pedagang pasar manakala tidak ada perlindungan dan model pengembangan pasar tradisional yang tepat ke depan.

Regulasi yang sudah ada yaitu Perpres 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern maupun Permendag yang mengatur pedomannya kiranya belum cukup melindungi pasar tradisional. Lebih-lebih belum tersedia arahan dan model yang dapat dicontoh untuk mengembangkannya.Sementara UU Perdagangan yang baru terbit juga banyak dikritik akibat kecenderungannya dalam mendorong liberalisasi pasar sehingga berdampak pada makin tergesernya peranan pasar tradisional.

Oleh karenanya, pada level pemerintah daerah atau manajemen di tingkat pasar tradisional perlu mempersiapkan diri sebagai salah satu upaya model pengembangan pasar tradisional agar pangsa pasar tradisional tidak makin tergerus dan berdampak negative pada kesejahteraan pedagang maupun produsen local. Adapun manfaat dari adanya pola ataupun model pengembangan (BIMTEK) sebagai berikut :

TUJUAN

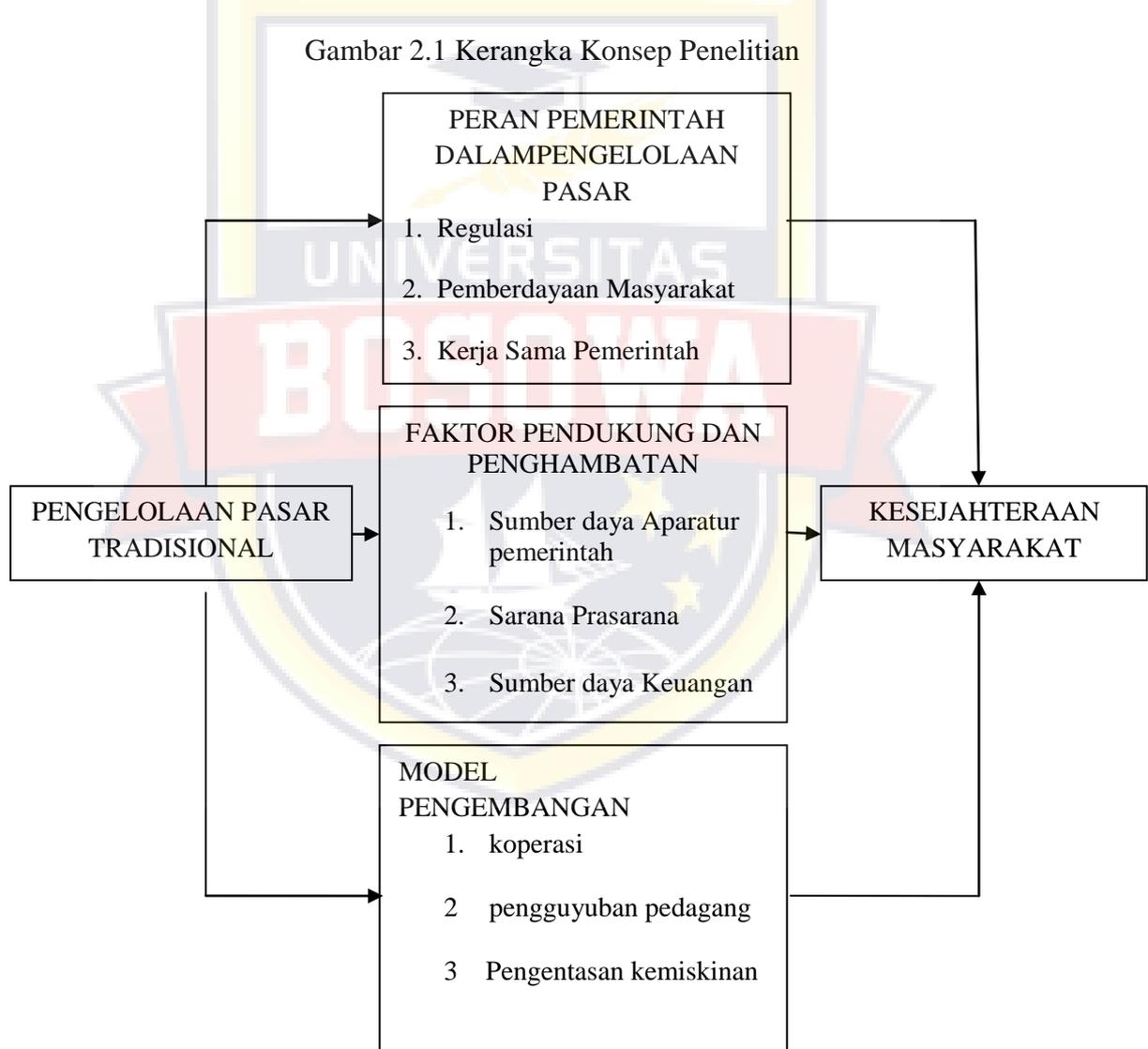
- a. Memperluas wawasan dan kemampuan peserta dalam memahami kondisi dan permasalahan mutakhir tentang pasar tradisional di Indonesia.
- b. Meningkatkan wawasan dan kemampuan peserta dalam merumuskan strategi dan kebijakan perlindungan kepada pelaku pasar tradisional.
- c. Meningkatkan wawasan dan keahlian peserta dalam merumuskan strategi kebijakan pengembangan pasar tradisional.
- d. Meningkatkan wawasan dan keahlian peserta dalam mengembangkan model-model pemberdayaan pasar tradisional.

KATEGORI PESERTA

- a. Kepala Dinas/Kantor Pengelola Pasar.
- b. Kepala Dinas Perdagangan dan Industri dan sub bidang terkait.
- c. Kepala Bidang terkait pada Dinas/Kantor Pengelola Pasar dan Dinas Perdagangan dan industri dan sub bidang terkait.
- d. Kepala Dinas Koperasi dan Pemberdayaan UMKM.

MATERI

- a. Gambaran tentang sector perdagangan dan peranan pasar tradisional dalam perekonomian daerah.
- b. Permasalahan dan tantangan/peluang dalam pengembangan pasar tradisional.
- c. Strategi perlindungan dan pengembangan pasar tradisional.



Sumber : Perpres 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern

Semua yang dilakukan pemerintah merupakan amanah UU untuk bagaimana segala sumber daya yang ada di dalam Negara republic Indonesia dapat dikelola dan di manfaatkan untuk semata-mata kesejahteraan masyarakat. Persoalan kemudian adalah dimana standar keajahteraan seperti yang dimaksud dalam UU? jawabannya adalah bagaimana pemerintah secara konsisten memperbaiki neraca pendapatan perkapita dan budaya konsumerisme yang tinggi harus di tekan apalagi terhadap produk-produk luar.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Dasar Penelitian

1. Tipe Penelitian yang digunakan adalah deskriptif Kualitatif
2. Dasar penelitian yang digunakan adalah survey, yang bertujuan untuk mengumpulkan data observasi dan interview, dengan ciri khusus dan kesimpulannya mencerminkan hanya untuk daerah yang bersangkutan.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan judul penelitian yang dikemukakan, maka jenis penelitian ini adalah kualitatif yang menggunakan pendekatan induktif, yaitu mendeskripsikan keadaan lapangan pada saat sekarang berdasarkan fakta yang sebenarnya

Menurut Moleong (2001: 6-7) menjelaskan, bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistic (utuh) dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata- kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah, serta dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah yang salah satunya bermanfaat untuk keperluan meneliti dari segi prosesnya.

C. Sumber Data

1. Data Primer adalah : data utama, yang masih perlu pengolahan melalui hasil wawancara yang dilakukan peneliti. Dalam hal ini sumber data diperoleh melalui teknik wawancara dari beberapa informen yang sudah ditentukan sebelumnya karna dianggap tahu banyak arena posisi dan

jabatannya yang terkait langsung dengan masalah dalam penelitian ini.

Data primer ini berupa antara lain :

- a) Hasil wawancara dari informan penelitian.
 - b) Hasil observasi peneliti ke lapangan secara langsung dalam bentuk catatan tentang situasi dan kejadian.
2. Data Sekunder adalah : data yang terkait dengan penelitian yang sudah diolah berupa dokumen – dokumen. Data ini di gunakan untuk informasi dari informan maupun dari observasi langsung ke lapangan.

D. Informan Penelitian

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari. Oleh karena itu, pada penelitian kualitatif ini, tidak di kenal namanya populasi dan sampel. Subjek penelitian yang telah tercermin dalam focus penelitian ditentukan secara sengaja. Subjek penelitian menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian.

Informan adalah seseorang yang benar- benar mengetahui persoalan dan permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan atau data- data yang dapat membantu dalam memahami persolan dan permasalahan tersebut.

Menurut Bambang Suyanto (2005 : 172) informen penelitian meliputi beberapa macam yaitu: 1) informan kunci (*keyinforman*) merupakan mereka yang mengetahui atau memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. 2) Informan utama merupakan mereka yang terlibat

langsung dalam interaksi social yang diteliti. 3) informan biasa merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi social yang diteliti.

1. Informan kunci berjumlah satu orang yaitu :

Berhubung penelitian ini berjudul Pengelolaan Pasar Tradisional Dalam peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Wewewa Selatan, maka peneliti mengambil Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Yaitu Bapak **Enos Eka Dede, S.Sos** sebagai informan kunci dalam penelitian ini, dikarenakan Dinas Tersebut merupakan lembaga penghimpun PAD yang diberikan Tanggung jawab oleh Bupati Sumba Barat Daya untuk mengelola pasar-pasar yang berada di Kabupaten Sumba Barat Daya.

2. Informen utama berjumlah Empat orang yaitu :

Untuk memperoleh informasi yang akurat, maka penulis membutuhkan informasi tambahan agar penelitian dapat memiliki data yang otentik, sehingga dapat dipertanggung jawabkan. Maka dari itu penulis mengambil 4orang sebagai informen utama, diantaranya:

- a. Kepala Pasar : Yosef MaghuRege
- b. Kepala Desa : Yulius Maghu Naga
- c. Camat : Charles Dappa Tondo, S.Sos
- d. Pedagang : Yuliana Milla

3. Informan biasa tidak terbatas : mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi social yang diteliti.

Misalnya : Masyarakat Umum/Para pengamat/Pegawai negeri dan lain-lain.

E. Instrumen Penelitian

Menurut Moleong (2007 : 9) dalam Penelitian Kualitatif,

“peneliti merupakan alat (instrument) pengumpulan data utama, karena peneliti adalah manusia yang dapat berhubungan dengan dengan informan, serta mampu memahami kaitan kenyataan- kenyataan di lapangan”

Oleh karena itu, peneliti juga berperan serta dalam pengamatan atau.Peneliti juga menggunakan alat- alat bantu untuk data seperti tape recorder, video kaset atau kamera. Tapi kegunaan atau pemanfaatan alat alat ini sangat tergantung pada diri sendiri.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara (interview) untuk memperoleh data dengan melakukan Tanya jawab langsung kepada informan yang telah ditentukan dengan pedoman wawancara.

2. Observasi (pengamatan) dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung pada obyek yang akan diteliti.

3. Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data dengan mempelajari dokumen, buku- buku, karya ilmiah, pendapat parah ahli dan literature lainnya yang memiliki relevansi dengan masalah penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Patton dalam bukunya Moleong (2000 : 103), adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian besar. Sesuai dengan metode penelitian, teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif yaitu : data yang terkumpul dan dianalisis kemudian dideskripsikan. Dalam penelitian ini akan diperoleh gambaran tentang "*Pengelolaan pasar Tradisional Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya NTT*". Pengelolaan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 4 (empat) tahap, sesuai dengan pendapat Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (1992 : 16- 20), yaitu:

1. Pengumpulan data (*field note*) peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan interview di lapangan
2. Reduksi data ; diartikan sebagai proses pemilahan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data- data "kasar" yang muncul dari catatan- catatan tertulis di lapangan.
3. Sajian data ; adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
4. Kesimpulan/ verifikasi data : didasarkan pada reduksi data dan sajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Kabupaten Sumba Barat Daya merupakan salah satu daerah di Nusa Tenggara Timur. Sumba Barat Daya terdiri 11 Kecamatan yakni Kecamatan Loura, Kecamatan Kota Tambolaka, Kecamatan Wewewa Barat, Kecamatan Wewewa Timur, Kecamatan Wewewa Utara, Kecamatan Wewewa Selatan, Kecamatan Wewewa Tengah, kecamatan Kodi Utara, Kecamatan Kodi, Kecamatan Kodi Balaghar, Kecamatan Kodi Bangedo. Dari seluruh Kecamatan yang ada yang dijadikan lokasi penelitian adalah kecamatan Wewewa Selatan karena Wilayah tersebut merupakan tanah kelahiran peneliti dan melihat aktivitas perdagangan merupakan salah satu sumber penghidupan warga masyarakat dikecamatan wewewa selatan tetapi karena alasan tidak memiliki akses jaringan telekomunikasi maka berdampak pada tidak majunya sector perdagangan di wilayah Kecamatan Wewewa selatan. Sebab Hanya ada beberapa kecamatan saja yang memiliki jaringan telekomunikasi di Kabupaten Sumba Barat Daya. Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Loura, Kecamatan Kota Tambolaka, Kecamatan Wewewa Barat dan Wewewa Timur. Secara geografis letak Sumba Barat Daya berada pada 9°,18 – 10°,20 LS, dan 118°,55 – 120°,23 BT . Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki luas wilannya: 1.445,77 Km², terdiri dari 11 (sebelas) Kecamatan. Tiap Kecamatan dibagi dalam desa serta kelurahan, yaitu 94 desa dan juga 2 kelurahan. Batas Sumba

Barat Daya adalah: Utara berbatasan Laut Sumba, Selatan berbatasan Samudra Indonesia, Kabupaten Sumba Barat, Barat berbatasan Samudra Indonesia, Timur berbatasan Kabupaten Sumba Barat.

1. Gambaran Umum Dinas pendapatan dan Pengelolaan Aset daerah Kabupaten Sumba Barat Daya

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya adalah sebagai berikut :

a. Kedudukan

Kedudukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten SBD adalah :

1. Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang keuangan.
2. Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan pendapatan asli daerah.

Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan pendapatan asli daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan pendapatan asli daerah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan pendapatan asli daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan pendapatan asli daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri atas :

1. Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
2. Sekretariat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, membawahi Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.
3. Bidang Pendataan dan Penetapan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris, membawahi 3 Sub Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang :
- 1) Sub Bidang Pelayanan dan Penetapan;
 - 2) Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
 - 3) Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya.
4. Bidang Penagihan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris, membawahi 3 Sub Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang :
- 1) Sub Bidang Penagihan I;
 - 2) Sub Bidang Penagihan II;
 - 3) Sub Bidang Penerimaan dan Keberatan.
5. Bidang Pengembangan, Pemeriksaan dan Evaluasi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris, membawahi 3 Sub Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang :
- 1) Sub Bidang Pengembangan
 - 2) Sub Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan;
 - 3) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT).

2. Peran Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Daerah Sebagai pengelola Pasar di Kabupaten Sumba Barat Daya

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Pemerintahan Kabupaten Sumba Barat Daya.

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Mempunyai Tugas Pokok “Melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah dibidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pengelolaan Asset Milik Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas pembantuan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama kepada dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Daerah Kab. Sumba Barat Daya *Bapak Enos Eka Dede S.sos*

“ Keberadaan Dinas Pendapatan Kab. Sumba Barat Daya Menjadi satu-satunya Lembaga yang Menghimpun Pendapatan Asli Daerah dan juga bertanggung jawab atas Pembangunan Daerah khususnya dalam hal pengelolaan pasar, selanjutnya Ia mengatakan bahwa Sistem perencanaan sampai pada eksekusi program Pengelolaan pasar, adalah

komitmen kerja sama lintas SKPD yang lainnya misalnya : Dinas Perindustrian dan perdagangan, Dinas Perhubungan, Koperasi dan UKM dan Badan Lingkungan Hidup” (05 juli 2017)

Uraian Tugas Dan Fungsisusunan organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Daerah terdiri atas :

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Daerah untuk mengkoordinasikan bidang-bidang dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :

- 1) pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
- 2) pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- 3) pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
- 4) pelaksanaan koordinasi penataan organisasi;
- 5) pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pengamanan aset;
- 6) pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;

- 7) pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

b. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- 1) melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
- 2) melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- 3) menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
- 4) menyusun bahan koordinasi dibidang administrasi umum dan kepegawaian;
- 5) melakukan pengelolaan dan pengamanan aset;
- 6) melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
- 7) melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas :

- 1) menyusun bahan koordinasi dan menyusun rencana kerja, rencana program, kegiatan dan anggaran keuangan;
- 2) menyusun bahan koordinasi dan menyusun laporan kinerja;
- 3) melakukan pengelolaan data dan perencanaan program;

- 4) menyusun bahan koordinasi dibidang penyusunan program dan penataan organisasi;
- 5) melakukan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
- 6) melakukan evaluasi anggaran dan penggunaan keuangan;
- 7) menyusun laporan keuangan;
- 8) melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
- 9) melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

d. Bidang Pendataan dan Penetapan

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan dan pengelolaan Asset Daerah meliputi pelayanan dan penetapan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta pajak daerah lainnya. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi:

- 1) pelaksanaan pelayanan atas permohonan wajib pajak;
- 2) pelaksanaan pelayanan konsultasi dan informasi kepada wajib pajak;
- 3) pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penilaian dan penetapan subjek/objek pajak;
- 4) pelaksanaan pengolahan data dan verifikasi subyek/obyek pajak daerah;
- 5) perumusan pengelolaan data induk wajib pajak;

- 6) pelaksanaan penetapan dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)/Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) dan dokumen lainnya;
- 7) perumusan dan penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) kepada wajib pajak serta menerima kembali isian SPOP dari wajib pajak;
- 8) perumusan dan penyampaian blangko Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada wajib pajak;
- 9) pelaksanaan pendaftaran dan penetapan Nomor Obyek Pajak (NOP);
- 10) pelaksanaan pendaftaran, penetapan, penerbitan dan penyampaian Kartu Pengenal Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
- 11) pelaksanaan verifikasi dan validasi SPTPD Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- 12) pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan dan Penetapan.

e. Sub Bidang Pelayanan dan Penetapan

Sub Bidang Pelayanan dan Penetapan mempunyai tugas :

- 1) melakukan pelayanan atas permohonan wajib pajak;
- 2) melakukan pelayanan konsultasi dan informasi kepada wajib pajak;
- 3) melakukan penerbitan dan menyampaikan kartu NPWPD;
- 4) melakukan pengolahan data dan verifikasi subyek/obyek pajak daerah;

- 5) melakukan penetapan dan menerbitkan SKPD/ SPPT/DHKP dan dokumen lainnya;
- 6) menyusun bahan penyusunan produk hukum;
- 7) melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
- 8) melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan dan Penetapan.

f. Sub Bidang Pbb P2 dan Bphtb

Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan mempunyai tugas :

- 1) menyusun dan menyampaikan blangko SPOP/Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP) kepada wajib pajak;
- 2) melakukan penerimaan SPOP/LSPOP dari wajib pajak;
- 3) melakukan pendaftaran dan menetapkan Nomor Obyek Pajak (NOP);
- 4) melakukan pendataan lapangan/lokasi obyek pajak;
- 5) melakukan penilaian obyek pajak;
- 6) melakukan verifikasi data SPOP/LSPOP PBB perdesaan dan perkotaan;
- 7) melakukan verifikasi dan validasi SPTPD BPHTB;
- 8) menyusun bahan penyusunan produk hukum;
- 9) Melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
- 10) Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan.

g. Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya

Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya mempunyai tugas :

- 1) Menyusun dan menyampaikan blangko SPTPD kepada wajib pajak;
- 2) Melakukan pendaftaran dan menetapkan NPWPD;
- 3) Melakukan pendataan obyek pajak;
- 4) Melakukan verifikasi pelaporan SPTPD dari wajib pajak;
- 5) Menyusun bahan penyusunan produk hukum;
- 6) Melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
- 7) Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan.

h. Bidang Penagihan

Bidang Penagihan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan dan pengelolaan Asset Daerah meliputi penagihan serta penerimaan dan keberatan. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Penagihan mempunyai fungsi :

- 1) pelaksanaan penyampaian SKPD/SPPT/DHKP dan dokumen lainnya;
- 2) pelaksanaan proses atas permohonan angsuran pembayaran pajak daerah;
- 3) pelaksanaan proses atas permohonan pengurangan keberatan dan banding ketetapan pajak daerah;
- 4) pelaksanaan proses penagihan pajak daerah
- 5) pelaksanaan proses penagihan dengan surat paksa;
- 6) pelaksanaan sosialisasi perpajakan daerah;
- 7) pelaksanaan penertiban pajak daerah;

- 8) pelaksanaan pengelolaan data piutang pajak daerah;
- 9) pelaksanaan penagihan piutang pajak daerah;
- 10) pelaksanaan penerimaan dan pembukuan;
- 11) pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
- 12) pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

i. Sub Bidang Penagihan I

Sub Bidang Penagihan I mempunyai tugas :

- 1) melakukan penyampaian SKPD/SPPT/DHKP dan dokumen lainnya di wilayah Kecamatan Kota Tambolaka, Kecamatan Loura, Kecamatan Kodi Utara, Kecamatan Kodi, Kecamatan Kodi Bangedo, Dan Kecamatan Kodi Balaghar ;
- 2) Melakukan proses penagihan pajak daerah di wilayah Kecamatan Kota Tambolaka, Kecamatan Loura, Kecamatan Kodi Utara, Kecamatan Kodi, Kecamatan Kodi Bangedo, Dan Kecamatan Kodi Balaghar ;
- 3) melakukan proses penagihan dengan surat paksa di wilayah Kecamatan Kota Tambolaka, Kecamatan Loura, Kecamatan Kodi Utara, Kecamatan Kodi, Kecamatan Kodi Bangedo, Dan Kecamatan Kodi Balaghar ;
- 4) Melakukan sosialisasi perpajakan daerah di wilayah Kecamatan Kota Tambolaka, Kecamatan Loura, Kecamatan Kodi Utara, Kecamatan Kodi, Kecamatan Kodi Bangedo, Dan Kecamatan Kodi Balaghar ;

- 5) melakukan penagihan piutang pajak daerah di wilayah Kecamatan Kota Tambolaka, Kecamatan Loura, Kecamatan Kodi Utara, Kecamatan Kodi, Kecamatan Kodi Bangedo, Dan Kecamatan Kodi Balaghar ;
- 6) Menyusun bahan penyusunan produk hukum;
- 7) Melakukan proses penertiban pajak daerah di wilayah Kecamatan Kota Tambolaka, Kecamatan Loura, Kecamatan Kodi Utara, Kecamatan Kodi, Kecamatan Kodi Bangedo, Dan Kecamatan Kodi Balaghar
- 8) Melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
- 9) Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan.

j. Sub Bidang Penagihan II

Sub Bidang Penagihan II mempunyai tugas :

- 1) melakukan penyampaian SKPD/SPPT/DHKP dan dokumen lainnya di Kecamatan Wewewa Barat, Kecamatan Wewewa Selatan, Kecamatan Wewewa Tengah, Kecamatan Wewewa Utara, dan Wewewa Timur ;
- 2) melakukan proses penagihan pajak daerah di Kecamatan Wewewa Barat, Kecamatan Wewewa Selatan, Kecamatan Wewewa Tengah, Kecamatan Wewewa Utara, dan Wewewa Timur
- 3) melakukan proses penagihan dengan surat paksa di Kecamatan Wewewa Barat, Kecamatan Wewewa Selatan, Kecamatan Wewewa Tengah, Kecamatan Wewewa Utara, dan Wewewa Timur ;

- 4) melakukan sosialisasi perpajakan daerah di Kecamatan Wewewa Barat, Kecamatan Wewewa Selatan, Kecamatan Wewewa Tengah, Kecamatan Wewewa Utara, dan Wewewa Timur ;
- 5) melakukan penagihan piutang pajak daerah di Kecamatan Wewewa Barat, Kecamatan Wewewa Selatan, Kecamatan Wewewa Tengah, Kecamatan Wewewa Utara, dan Wewewa Timur ;
- 6) menyusun bahan penyusunan produk hukum;
- 7) melakukan proses penertiban pajak daerah di Kecamatan Wewewa Barat, Kecamatan Wewewa Selatan, Kecamatan Wewewa Tengah, Kecamatan Wewewa Utara, dan Wewewa Timur ;
- 8) melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
- 9) melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan.

k. Sub Bidang Penerimaan dan Keberatan

Sub Bidang Penerimaan dan Keberatan mempunyai tugas:

- 1) memproses permohonan angsuran pembayaran pajak daerah;
- 2) memproses permohonan pengurangan, keberatan dan banding ketetapan pajak daerah;
- 3) melakukan pengeloaan data piutang pajak daerah;
- 4) melakukan penerimaan dan pembukuan;
- 5) menyusun bahan penyusunan produk hukum;
- 6) melakukan evaluasi dan menyusun laporan;

- 7) melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bidang Penagihan.



I. Bidang Pengembangan, Pemeriksaan dan Evaluasi

Bidang Pengembangan, Pemeriksaan dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pendapatan dan pengelolaan Asset Daerah dalam melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah meliputi pengembangan, pemeriksaan dan penyidikan serta evaluasi dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengembangan, Pemeriksaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- 1) perumusan bahan kebijakan teknis pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- 2) perumusan produk hukum perpajakan daerah;
- 3) perumusan perencanaan target PAD;
- 4) pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemungutan PAD;
- 5) pelaksanaan koordinasi peningkatan potensi PAD;
- 6) pelaksanaan evaluasi pemungutan PAD;
- 7) pelaksanaan pemeriksaan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah;
- 8) pelaksanaan penelitian bahan dan keterangan lingkup penindakan pelanggaran ketentuan perpajakan daerah;
- 9) pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana perpajakan;
- 10) pelaksanaan pelaporan atas pemungutan PAD;
- 11) pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- 12) pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

m. Sub Bidang Pengembangan

Sub Bidang Pengembangan mempunyai tugas :

- 1) melakukan pengumpulan data potensi retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD;
- 2) menyusun perencanaan target PAD;
- 3) melakukan pemberian rekomendasi dalam penyusunan petunjuk teknis pemungutan retribusi daerah;
- 4) menyusun bahan penyusunan produk hukum perpajakan daerah;
- 5) menyusun data potensi retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD;
- 6) melakukan pembinaan teknis atas pemungutan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD;
- 7) melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
- 8) melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan, Pemeriksaan dan Evaluasi.

n. Sub Bidang Pemeriksaan dan Penyelidikan

Sub Bidang Pemeriksaan dan Penyelidikan mempunyai tugas:

- 1) melakukan monitoring dan evaluasi pemungutan PAD;
- 2) melakukan pengawasan, pengamatan dan penelitian bahan dan keterangan lingkup penindakan pelanggaran ketentuan perpajakan daerah;
- 3) memproses pemeriksaan kewajiban perpajakan daerah;

- 4) memproses pemeriksaan kewajiban retribusi dan lain-lain PAD yang sah;
- 5) menyusun bahan koordinasi penyidikan dengan aparat penegak hukum;
- 6) memproses penyidikan tindak pidana perpajakan;
- 7) melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
- 8) melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan, Pemeriksaan dan Evaluasi.

o. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- 1) melakukan pencatatan dan akses data penerimaan PAD dalam program sistem aplikasi keuangan;
- 2) melakukan rekonsiliasi penerimaan PAD;
- 3) menyusun rancangan program sistem aplikasi administrasi pajak daerah;
- 4) melakukan pengendalian operasional program sistem aplikasi administrasi pajak daerah;
- 5) menyusun data realisasi pajak dan retribusi daerah untuk perhitungan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah;
- 6) menyusun laporan penerimaan PAD;
- 7) melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
- 8) melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan, Pemeriksaan dan Evaluasi.

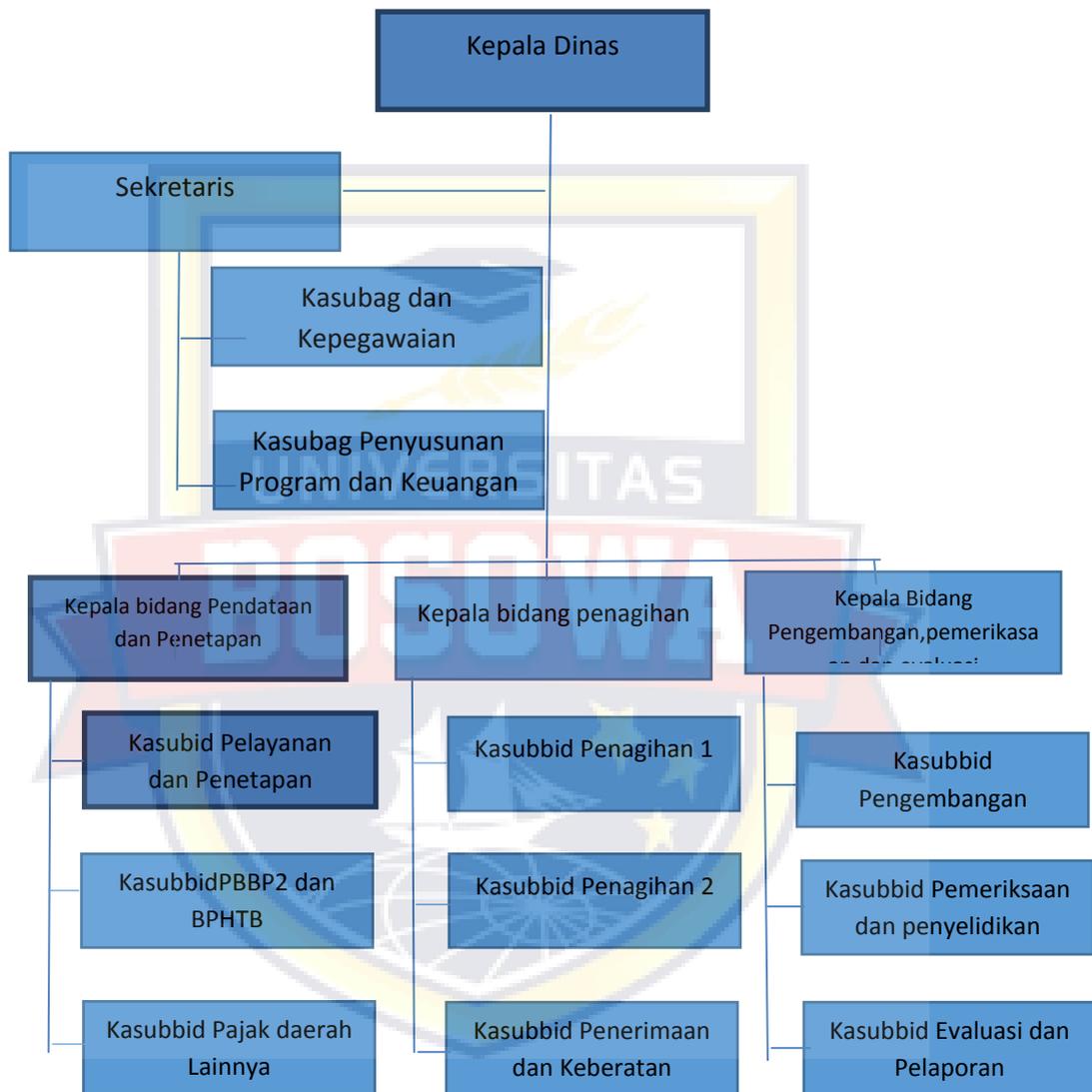
p. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

Kelompok jabatan fungsional tertentu mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan dan pengelolaan Asset Daerah sesuai dengan keahlian, keterampilan dan kebutuhan.

Susunan Organisasi dan Uraian Tugas dan Fungsi UPT ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.



GAMBAR.1. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN ASSET DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA



(sumber Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Daerah

Kab. Sumba Barat Daya Tahun 2015)

Cakupan Kegiatan/ Wilayah Pelayanan Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Asset Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya.

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Daerah kabupaten Sumba Barat Daya sebagai Dinas Teknis melaksanakan tugas mengelola penerimaan Retribusi dibidang perpasaran yang merupakan sumber dari APBD Kabupaten Sumba Barat Daya. Dinas pendapatan Dan Pengelolaan Asset daerah Kabupaten Sumba Barat Daya merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Sumba Barat daya yang juga mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dibidang Pengelolaan Pasar, Pembangunan Pasar, Pembangunan Pasar percontohan penyediaan tempat usaha bagi pedagang informal berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku serta melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati, saat ini Dinas pendapatan dan Pengelolan assest daerah mempunyai Unit pelaksana Teknis yang membawahi 10 pasar yang ada di Kabupaten Sumba barat daya antara lain:

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| a. Pasar Wee Wulla | f. Pasar Wee Tombo |
| b. Pasar Karuni | g. Pasar Waiha |
| c. Pasar Wimangura | h. Pasar Rada Mata |
| d. Pasar Kori | i. Pasar Wee rame |
| e. Pasar Bondo kodi | j. PasarPalla |

3. Gambaran Umum Pasar Tradisional Wee Wulla Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT.

Pasar tradisional wee Wulla berada di Tengah Antara kecamatan Wewewa Selatan Dan Kodi Balaghar berada di Jalan Poros Desa Wee Wulla, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten sumba barat daya, Nusa Tenggara Timur. Pasar tradisional Wee Wulla dibangun pada Tahun 1990, Luas Tanah 7.059 m². Pasar Tradisional Wee Wulla Kecamatan Wewewa Selatan Kab. Sumba Bara daya mempunyai fasilitas seperti: Toko/Kios Lantai Dasar mempunyai 64 Unit, Los Amperan sampai saat ini terdapat 266 Unit. Sarana Pendukung Pasar Tradisional Wee Wulla pada saat ini mempunyai KM/WC Umum, dan TPS Sampah Pasar Wee Wulla sudah beberapa kali melakukan perombakan. Perombakan pertama pada tahun 1973 dan mengalami perombakan lagi tahun 1978. Seiring perkembangan akhirnya pada tahun 1990 dibangunlah bangunan permanen untuk para pedagang. Dengan adanya pembangunan maka untuk sementara pasar dipindahkan ke lokasi lain. Kemudian pada tahun 1991 setelah bangunan permanen jadi, maka pasar kembali dipindahkan ke tempatnya semula. Pasar Wee Wulla akhirnya beroperasi di Desa Wee Wulla hingga sekarang.

a. Letak dan Kondisi Pasar Wee Wulla

Pasar Wee Wulla merupakan salah satu pasar tradisional dari sembilan pasar Tradisional yang sudah dikenal oleh masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Sumba barat Daya maupun masyarakat di luar Kabupaten Sumba Barat Daya. Adanya sebuah sekolah maka

membuka peluang juga kepada pedagang untuk mencari nafkah. Pedagang pun mulai berdagang di sekitaran sekolah tersebut. Melihat fenomena tersebut maka Pemerintah membuat sebuah kebijakan yaitu menjadikan lokasi tersebut menjadi sebuah pasar tradisional dengan nama pasar Wee Wulla. Pasar Wee Wulla terletak di desa Wee Wulla Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba barat Daya.

Sejak pertama kali Pasar Wee Wulla dibangun belum pernah mendapatkan perawatan atau perbaikan dari Pemerintah sehingga kondisi bangunan pasar Wee Wulla pada saat ini membutuhkan perhatian dari Pemerintah. Senada dengan hasil wawancara bersama *Bapak Yulius Maghu Naga* selaku kepala desa wee wulla menyatakan bahwa :

“Pasar wee wulla saat ini memiliki bangunan yang sudah rapuh dan dapat membahayakan para pengunjung maupun pedagang. Hal ini juga dikarenakan dengan melihat kondisi pasar Wee Wulla yang semakin hari semakin padat oleh para pedagang sebagai akibat dari adanya peningkatan jumlah penduduk yang menjalankan aktivitas disektor perdagangan, menyebabkan areal pasar ini tidak lagi mampu menampung pedagang sehingga pedagang memilih berjualan di pinggir jalan raya sehingga menyebabkan akses transportasi menjadi macet. .(07 juli 2017)

Oleh karena itu, pemerintah membuat sebuah kebijakan pembangunan dan penataan kembali pasar Wee wulla dengan harapan terciptanya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat Kecamatan Wewewa selatan serta terciptanya bangunan yang indah, tertib dan aman.

Berdasarkan hasil wawancara dengan camat wewewa selatan *Bapak Charles Dappa Tondo, S.sos*

“Bahwa garis koordinasi antara kecamatan wewewa selatan dan dinas pendapatan dan pengelolaan asset daerah sumba barat daya tidak begitu efektif dikarenakan sistem pemungutan retribusi bersifat langsung oleh petugas pemungut retribusi artinya terjadi diskomunikasi. tandas beliau bahwa kecamatan diibaratkan seperti petugas pemadam artinya: ketika terjadi kericuhan, kekacauan di wilayah pasar baru kecamatan yang dicecar berbagai macam pertanyaan. (07 juli 2017)

Seperti gambar di bawah ini menunjukkan bahwa pasar tradisional Wee Wulla sampai saat ini masih di penuh oleh para pedagang mulai dari pedagang kaki lima pedagang sembako, mainan, Pakaian hingga makan-makanan ringan sampai mereka Harus berjualan di Tanah. Sehingga sampai saat ini pasar tradisional Wee wulla masih beroperasi walaupun keadaan pasarnya yang kumuh, bau sampah, dan becek, tetapi para pedagang sampai saat ini masih mencari rizky di pasar tradisional tersebut.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan pasar tradisional banyak melibatkan stakeholders. Masingmasing stakeholders yang terlibat memiliki peran atau keterlibatan yang berbeda-beda. Tujuan kajian ini adalah untuk mendeskripsikan, mengidentifikasi, dan menganalisis peran atau keterlibatan stakeholders dalam kebijakan pengembangan pasar tradisional. Kajian ini menggunakan metode atau pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil kajian ini adalah ada 3 (tiga) bentuk peran atau

tingkat keterlibatan stakeholders dalam kebijakan pengembangan pasar tradisional selama ini di Kabupaten Sumba Barat Daya, yaitu: (1) Dinas Pendapatan (2) Disperindagkop serta Bappeda Kabupaten Sumba Barat Daya terlibat/berperan sebagai pengambil keputusan, Namun, tidak semua stakeholders berperan aktif dalam pengembangan Pasar di Kabupaten Sumba Barat Daya. Padahal stakeholder ini sangat diperlukan untuk memberikan masukan atau pertimbangan dalam kebijakan pengembangan pasar tradisional sesuai dengan masing-masing tupoksinya.

Hasil identifikasi lapangan menunjukkan terdapat beberapa stakeholders yang terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan pasar tradisional di Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penggolongan stakeholders berdasarkan tingkat kepentingannya terhadap kebijakan pengembangan pasar tradisional. Penggolongan yang dimaksud adalah: (1) Stakeholders primer, yaitu yang dipengaruhi secara langsung, baik secara positif (penerima manfaat) atau negatif (terkena dampak negatif) akibat pengembangan pasar tradisional. Pihak yang tergolong stakeholders primer adalah: (a) Asosiasi Masyarakat Pedagang (AMP), (b) Disperindagkop. (c) Badan Perencanaan Daerah (Bappeda), (d) Dinas pendapatan dan pengelolaan aset daerah (e) UPTD Pasar; dan (2) Stakeholders sekunder, yaitu yang terkait dengan kebijakan secara tidak langsung dalam proses pengembangan pasar tradisional. Pihak yang tergolong stakeholders sekunder ini adalah: (a) Dinas Tata Kota (DTK), (b) Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD), dan (c) Dinas

Keuangan. Perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan pasar tradisional dipengaruhi oleh tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh stakeholders, dan masing-masing stakeholders memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh yang berbeda-beda. Selain itu, intensitas pengaruh dan kepentingan stakeholders didasarkan pada bentuk interaksi, keuntungan, dan dampak yang dihasilkan terhadap kebijakan pengembangan pasar tradisional, termasuk posisi yang kuat dalam setiap pengambilan keputusan yang akan dilakukan.

1. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Pasar Tradisional

a. Faktor pendukung

1) Sumber Daya Aparatur pemerintah

Sumber daya Manusia Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Asset Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya berjumlah 152 orang PNS dan 136 Orang Tenaga kontrak yang dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, dan pendidikan, sebagai berikut:

a) PNS Berdasarkan Golongan

Tabel 1:

Data PNS Berdasarkan Golongan

GOLONGAN	A	B	C	D	JUMLAH
I	2	4	7	3	16
II	14	53	5	1	73
III	14	13	6	23	56
IV	5	1	1	-	7
TOTAL					152

Sumber: LAKIP Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan

Asset Daerah Tahun 2015

b) PNS Berdasarkan Pendidikan

Tabel 2:
Data PNS Berdasarkan
Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S-3	-
2	S-2	4
3	S-1 / DIV	52
4	D III	-
5	D I	1
6	SLTA	69
7	SLTP	14
8	SD	12
	JUMLAH	152

Sumber: LAKIP Dinas Pendapatan dan Pengelolaan

Asset Daerah Tahun 2015

c) Tenaga Kontrak Berdasarkan Tugas

Tabel 3:
Tenaga Kontrak Berdasarkan
Tugas

NO	TUGAS	JUMLAH
1	Tenaga Administrasi	21
2	Operator Komputer	9
3	Tenaga Ahli Mesin, Listrik dan Kendaraan	1
4	Tukang Sapu	67
5	Juru Salar	8
6	Sopir	9
7	Kernet	19
8	Jaga Malem	1
9	Cleaning Service	1
	JUMLAH	136

*Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Daerah
Tahun 2015*

2) Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai berikut:

- a. Mobil Dinas/Operasional 2Unit.
- b. Mobil Pick-Up sebanyak 1Unit.
- c. Mobil Mini Bus sebanyak 1Unit.
- d. Motor Operasional sebanyak 5Unit.
- e. Peralatan Kantor danLain-lain.

3) Sumber DayaKeuangan

Sumber Daya Keuangan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya berasal dari APBD Kabupaten

Sumba Barat Daya baik untuk belanja langsung maupun belanja tidak langsung.

Maraknya pasar modern di berbagai kota di Indonesia benar-benar membuat para pelaku usaha di pasar tradisional kalang kabut. Pasar modern pada umumnya menyediakan kebutuhan primer hingga kebutuhan sekunder ini mulai menggerus keberadaan pasar tradisional. Bahkan, omzet penjualan pasar tradisional telah menurun drastis seperti yang terjadi di beberapa pasar tradisional di Kota-kota di Nusa Tenggara Timur. Tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti pasar tradisional akan benar-benar punah apabila perkembangan pasar modern tidak dibendung oleh kebijakan pemerintah. Lebih dari itu, pasar modern kini hadir sangat dekat dengan pasar tradisional seperti Alfamart, dan Indomaret. Pasar modern itu juga membidik konsumen kalangan menengah ke bawah untuk berbelanja di outlet mereka.

Kalangan skeptis mengemukakan pendapat jika pasar tradisional tidak akan punah di Indonesia. Banyak penduduk di desa hingga kota kecil yang akan setia berbelanja di pasar tradisional. Penduduk di desa hingga kota kecil memiliki daya beli yang rendah. Sedangkan harga kebutuhan pokok utama mereka seperti sayur mayur ataupun ikan segar di pasar modern masih tergolong mahal dan tidak terjangkau. Selain itu, budaya tawar-menawar dalam berbelanja di Indonesia juga tidak akan bisa ditemui di pasar modern. Oleh karenanya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Di dunia ini memang tidak ada yang tidak mungkin.

Jadi bisa saja suatu saat pasar tradisional di Indonesia akan punah ditelan oleh waktu. Senjata yang diperlukan untuk menyelamatkan pasar tradisional dari kepunahan hanya ada dua, yaitu peraturan pemerintah tentang perlindungan pasar tradisional dan perubahan dari pasar tradisional itu sendiri. Dua senjata pamungkas itu setidaknya akan mengembalikan kejayaan pasar tradisional di Indonesia seperti puluhan tahun yang lalu di mana pasar modern belum memasuki atmosfer persaingan bisnis.

Selanjutnya, kinerja pasar tradisional selain disebabkan oleh adanya pasar modern, penurunannya justru lebih disebabkan oleh lemahnya daya saing para pasar tradisional. Kondisi pasar tradisional pada umumnya memprihatinkan. Banyak pasar tradisional yang tidak terawat sehingga dengan berbagai kelebihan yang ditawarkan oleh pasar modern kini pasar tradisional terancam oleh keberadaan pasar modern. Ekapribadi (2007) menambahkan bahwa mengenai kelemahan yang dimiliki pasar tradisional. Kelemahan tersebut telah menjadi karakter dasar yang sangat sulit di ubah. Faktor desain dan tampilan pasar, atmosfer, tata ruang, tata letak, keragaman dan kualitas barang, promosi pengeluaran, jam operasional pasar yang terbatas, serta optimalisasi pemanfaatan ruang jual merupakan kelemahan terbesar pasar tradisional dalam menghadapi persaingan dengan pasar modern.

Faktor lain yang juga menjadi penyebab kurang berkembangnya pasar tradisional adalah minimnya daya dukung karakteristik pedagang tradisional, senada dengan pendapat kepala/coordinator pasar bersama bapak *Yosep Magho Rege* mengatakan bahwa :

“Pasar wee wulla sebenarnya merupakan pasar yang terletak strategis berdasarkan topografi maupun demografi, karna diapik oleh beberapa desa namun pada kenyataannya gairah dan minat pembeli yang disebabkan oleh tidak bersih, kumuh dan beceknnya pasar wee wulla ditambah tidak optimalnya sarana prasarana penunjang lainnya seperti WC, tempat sampah, dan jaminan keamanan sehingga dikuatirkan akan mempengaruhi eksistensi pasar ini. Ditambahnya lagi dari sisi “strategi perencanaan yang kurang baik, terbatasnya akses permodalan yang disebabkan jaminan (*collateral*) yang tidak mencukupi, tidak adanya skala ekonomi (*economies of scale*), tidak adanya jalinan kerja sama dengan pemasok besar, buruknya manajemen pengadaan, dan ketidakmampuan untuk menyesuaikan dengan keinginan konsumen (20 juli 2006).

Hal ini diperkuat dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Paesoro (2007) menunjukkan bahwa penyebab utama kalah bersaingnya pasar tradisional dengan supermarket adalah lemahnya manajemen dan buruknya infrastruktur pasar tradisional, bukan semata-mata karena keberadaan supermarket. Supermarket sebenarnya mengambil keuntungan dari kondisi buruk yang ada di pasar tradisional.

Diantara berbagai kelemahan yang telah disebutkan di atas, pasar tradisional juga memiliki beberapa potensi kekuatan, terutama kekuatan sosio emosional yang tidak dimiliki oleh pasar Modern. Kekuatan pasar

tradisional dapat dilihat dari beberapa aspek. Aspek-aspek tersebut diantaranya harganya yang relatif lebih murah dan bisa ditawar, dekat dengan pemukiman, dan memberikan banyak pilihan produk segar. Kelebihan lainnya adalah pengalaman berbelanja memegang langsung produk yang umumnya masih sangat segar. Akan tetapi dengan adanya hal tersebut bukan berarti pasar tradisional bukan tanpa kelemahan. Selama ini justru pasar tradisional lebih dikenal memiliki banyak kelemahan, antara lain kesan bahwa pasar terlihat becek, kotor, bau, dan terlalu padat lalu lintas pembelinya. Ditambah lagi ancaman bahwa keadaan sosial masyarakat yang berubah, dimana wanita diperkotaan umumnya berkarier sehingga hampir tidak mempunyai waktu untuk berbelanja ke pasar tradisional.

Maka dari itu, konsep revitalisasi untuk mempertahankan eksistensi pasar tradisional itu sangat penting. Sudah barang tentu revitalisasi tidak hanya sebatas bangunan dan regulasi pemerintah. Akan tetapi, semua aspek yang menjadi instrument pasar tradisional memerlukan revitalisasi. Baik dari segi manajemen, pola pengembangan pasar, pelaku pasar, dana penunjang pengembangan dan lain-lain

b. Faktor Penghambat

1. Regulasi

Aspek regulasi merupakan tatanan aturan yang dapat memberikan acuan dan sekaligus batasan dalam pengelolaan pasar tradisional misalnya dalam pro-kontra pandangan terhadap beberapa regulasi Pengelolaan

dan atau pemberdayaan Pasar tradisional, apa lagi beberapa regulasi yang lebih memberikan ke khususan bagi pasar modern misalnya dalam beberapa artikel menyebutkan istilah “Pasar Modern Menggusur Pasar Tradisional” Sejalan dengan Menurut Kepala dinas Pendapatan kab. SBD bapak **Enos Eka Dede S.Sos**,

“hal ini bagaikan pedang bermata dua. Apabila mengenai perizinan ini tidak diatur dan di tata dengan baik serta pejabat yang duduk disini tidak konsisten menjalankan aturan yang telah dibuat maka bisa menjadi bomerang. Mengapa? Karena ketika daerah diberi kesempatan untuk mengatur pasti juga akan mempertimbangkan pemasukan daerah untuk menambah PAD dalam rangka mempersiapkan anggaran yang pada akhirnya bisa berujung pada mendahulukan kepentingan para investor besar bahkan investor asing sebagai pengusaha ritel besar/ pasar modern seperti *hypermart*, mall, minimarket dll., dibandingkan dengan pasar tradisional/ pengusaha kecil.”

Di satu sisi pasar tradisional harus tetap hidup bahkan harus mampu bersaing dengan Pasar Modern, tetapi di sisi lain pemerintah daerah/ kota juga berkehendak memperoleh PAD yang sebesar-besarnya tentunya juga untuk kesejahteraan rakyat di masing-masing daerahnya.

Maka sekali lagi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana agar Pasar Tradisional agar tetap berkembang dengan meningkatkan kualitas kebersihan dan pelayanannya agar sebanding dengan pasar Modern di satu sisi dan di sisi lain pemerintah Daerah/ Kota/ Propinsi bisa mengatur/ membatasi pendirian Pasar Modern dengan memperhatikan jarak antara Pasar Tradisional yang telah ada dengan Pasar Modern yang akan berdiri/ di buka.

Di dalam Permendag Nomor 53 Tahun 2008 ini memang telah mengatur mengenai Pemberdayaan Pasar Tradisional (Pasal 17). Akan tetapi juga tidak ada penjelasan pemberdayaan yang seperti apa dan bagaimana?. Oleh karena itu sebaiknya pemerintah daerah/ kota setempat harus mampu menterjemahkan tentang “pemberdayaan” yang dimaksud dengan memperhatikan kemampuan dan kekhasan daerah masing masing tentunya.

2. Model Pengembangan Pasar Tradisional Kabupaten Sumba Barat

Daya

Sebagaimana diketahui bahwa pasar tradisional merupakan tempat interaksi masyarakat menengah ke bawah pada umumnya. Sehingga para pelaku pasar tradisional tidak mustahil yang menggeluti di bidang ini sangat sedikit mereka yang berlatar belakang pendidikan dari perguruan tinggi. Seperti yang pernah diteliti oleh Agustinus Dapa Leti dkk, menyebutkan bahwa pelaku pasar tradisional di wilayah Daerah Nusa Tenggara Timur tercatat lulusan perguruan tinggi sekitar (5%), SMA (40%), SMP (15%) selebihnya adalah lulusan SD (40%).

Dengan melihat kondisi ini sangat jauh jika dibandingkan dengan sistem pengelolaan pasar modern yang sudah mandiri. Oleh karenanya, melihat keperhatian seperti ini pemerintah Kabupaten Sumba barat daya melakukan kerjasama dengan beberapa instansi terkait yang berhubungan langsung dengan pengelolaan pasar tradisional. Seperti yang diungkapkan

oleh kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Daerah Bapak *Enos*

Eka Dede, S.sos

“Dalam menjalankan roda organisasi di dinas ini, maka kami melakukan program kebijakan lintas instansi yang mampu di ajak kerjasama dalam pengelolaan pasar tradisional. Misal, instansi Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Perindagkop, Dinas Perhubungan, Perbankan, BLH, Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumba Barat Daya”.

Seperti halnya dalam melaksanakan kebijakan tersebut implikasinya sudah saatnya diperlukan reorientasi prinsip kemitraan. Jalinan kemitraan harus didasarkan atas prinsip sinergi, yaitu saling membutuhkan dan saling membantu. Prinsip saling membutuhkan akan menjamin kemitraan berjalan lebih langgeng karena bersifat alami dan tidak atas dasar belas kasihan. Berlandaskan prinsip ini, usaha besar akan selalu mengajak usaha kecil sebagai *partner in progress*. Pola bapak-anak angkat banyak yang tidak didasari atas prinsip saling membutuhkan. Maka dari itu, melalui pola kemitraan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Daerah Kabupaten Sumba Barat dayapun melaksanakan program tersebut.

Sudah barang tentu, berdasarkan landasan ini ditopang dengan badan hukum dari masing-masing instansi terkait dilingkungan masing-masing dinas. Misal, seiring dengan perkembangan zaman saat terkait perdagangan bebas bukan rahasia umum akan terciptaknya praktek monopoli dilapangan yang dilakukan oleh oknum bisa terjadi. Oleh karena itu, berdasarkan landasan dari pemerintah pusat, melalui peraturan presiden pemerintah wajib mengelola segala bidang ekonomi agar tidak

terjadinya monopoli. Sehingga bentuk implikasinya bisa dilakukan bidang kerja sama antar instansi tersebut.

Model lain disebutkan dalam melakukan perkembangan di pasar tradisional berdasarkan peraturan daerah, Dinas Pendapatan dan Pengelola menjalankan pembentukan organisasi lembaga teknis. Dalam hal ini bisa diartikan bahwa dalam keadaan mendesak pemerintah daerah dibawah naungan Dinas Pendapatan dan Pengelola bisa membentuk lembaga organisasi teknis untuk berjalannya kinerja dilapangan, baik bisa diimplementasikan pembantuan pekerja dalam penarikan retribusi maupun pengelola pasar dilapangan. Kemudian, dalam bentuk proses pemberdayaan bagi pelaku pasar diatur dalam badan hukum.

Kemudian, hal itu disusul dengan kebijakan kerjasama lintas instansi yang bersama-sama mengembangkan pasar tradisional. Hal ini didukung pula oleh kebijakan pemerintah daerah melalui peraturan bupati yang mengatur ulang penataan pasar modern. Sehingga mampu merancang draft pengelolaan pasar yang *fair* dalam bentuk persaingan yang sehat. Sampai hari ini model pengembangan pasar tradisional telah mampu mempromosikan diri melalui event-event pameran kerajinan, bursa tanaman hias, agenda pentas budaya, maupun kesenian tradisional lainnya secara rutin dan berkelanjutan.

Dari hal itulah, maka harapan dari model pengembangan pasar tradisional bisa benar-benar diterapkan dengan maksimal. Sehingga dalam upaya meningkatkan peranserta para pelaku pasar tradisional di

Kabupaten Sumba Barat Daya bisa diperbaiki baik dalam bentuk operasional manajerial maupun sistem manajemen mutu menjadi lebih baik. Walaupun sejatinya korporasi asing maupun kepingan pasar modern menyerbu tingkat desa, paling tidak bentuk nyata pemerintah dalam mempertahankan eksistensi pasar tradisional betul-betul bisa dilaksanakan sesuai dengan badan dan aturan hukum yang berlaku. Beberapa Konsep perkembangan yang telah di pergunakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Barat di bawah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset daerah

a. Kebijakan Pemerintah dalam mengembangkan dan Menjaga Eksistensi Pasar Tradisional

Realisasi kebijakan dipengaruhi oleh bagian terpenting dari instrumen pemerintah. Dalam hal ini tercakup dalam badan hukum dan implementasi teknis dari kebijakan itu sendiri. Seperti yang diungkapkan di atas, bahwa hal terpenting dari terealisasinya kebijakan itu karena ada faktor pendukung internal maupun eksternal. Di faktor internal kita ketahui yang mengatur dari segala aspek regulasi itu adalah aturan hukum mulai dari pusat hingga daerah. Sedangkan, faktor eksternal adalah mereka yang berkecimpung langsung dengan kondisi dilapangan. Semisal, pelaku pasar, Desa pasar maupun dinas terkait. Dalam pelaksanaannya, dibawah naungan Dispenda sudah memberikan kontribusi bagi berjalannya pasar tradisional di Kabupaten Sumba Barat Daya sejak Tahun 2004.

b. Kontruksi dan Rekontruksi Bangunan Pasar Tradisional

Sejauh ini, seperti data yang tersaji diatas sekurangnya ada 10 pasar tradisional yang dikelola oleh DISPENDA. Sampai saat ini baik yang direkonstruksi maupun kontruksi sudah berjalan dengan maksimal. Diantaranya dengan membangun 3 pasar besar di Kabupaten Sumba barat daya, yakni Pasar waimangura, Pasar Tanateke dan Pasar Kori. Hal ini dilakukan dalam rancangan APBD tahun 2016-2017. Dari ketiga pasar tradisional yang dikategorikan klaster besar itu dalam pembangunan melakukan rekonstruksi diantaranya Pasar waimangura melaksanakan pembangunan pagar pasar dan penyempurnaan lapak pasar, Pasar tanatekemelaksanakan pembangunan bak sampah dan WC umum, dan Pasar kori melaksanakan pembangunan pagar pasar serta pembangunan los tambahan.

Selain itu, beberapa pembangunan pasar lain diantaranya Pasar Waimangura dengan pembangunan los dan kios yang bisa menampung sejumlah 180 pedagang arahan di sebelah selatan pasar, yang jumlahnya saat ini 124 pedagang. Kemudian, Pasar Waiha melakukan pembangunan tahap I adalah pembangunan los dan kios, yang akan digunakan untuk menampung 10 pedagang kios di depan dan pedagang arahan disebelah selatan pasar sebanyak 96 orang, daya tampungnya sekitar 120 pedagang. Dilanjutkan pasar Weerame melaksanakan relokasi pasar ke arah selatan.

Dari pelaksanaan rekonstruksi dan konstruksi di atas program kantor pasar pun merancang dan menata ulang tentang perkembangan tersebut.

Namun, oleh karena kurangnya dana penunjang untuk melakukan program tersebut, seringkali harus menunggu dan berpikir ulang untuk mewujudkannya. Dalam hal ini, sudah barang tentu melakukan program dengan seksama dan ekstra pemikiran lebih karena kita ketahui bersama bahwa pasar tradisional mulai ditinggalkan oleh masyarakat, karena makin maraknya toko modern.

c. Pemberdayaan Pelaku Pasar

Istilah pemberdayaan adalah terjemahan dari istilah asing *empowerment*. Secara leksial, pemberdayaan berarti penguatan. Secara teknis, istilah pemberdayaan dapat disamakan atau setidaknya diserupakan dengan istilah pengembangan. Memberdayakan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Selanjutnya, titik tolak pemberdayaan adalah pengenalan bahwa setiap manusia atau setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah untuk membangun daya itu dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang memilikinya serta upaya untuk mengembangkannya. Dengan diikuti memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat

tersebut. Melihat kondisi ini senada dengan apa yang di ungkapkan ibu

Yuliana Milla (salah seorang pedagang) mengatakan bahwa:

Sebenarnya kami para pedagang sangat mengharapkan adanya BIMTEK dan berbagai pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan Kewirausahaan agar menambah wawasan kami dalam berdagang tetapi masalahnya selama ini adalah tidak adanya Kedekatan pemerintah dengan Para Pedagang. Pemerintah Cuma tahunya pungut Retribusi dalam setiap hari pasar.

Pemberdayaan pada hakekatnya merupakan sebuah konsep yang fokusnya adalah kekuasaan. Pemberdayaan secara substansial merupakan proses memutus (*break down*) dari hubungan antara objek dan subjek. Menurut Indrasari Tjandraningsih, mengutamakan usaha sendiri dari orang yang diberdayakan untuk meraih keberdayaannya. Oleh karena itu, pemberdayaan sangat jauh dari konotasi ketergantungan. Dalam prakteknya, konsep pemberdayaan dapat dilihat dari tiga sisi. *Pertama*, pemberdayaan dengan menciptakan suasana atau iklim yang berkembang. *Kedua*, pemberdayaan untuk memperkuat potensi ekonomi atau daya yang dimiliki masyarakat. *Ketiga*, pemberdayaan melalui pengembangan ekonomi kerakyatan, dengan cara melindungi dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta menciptakan kebersamaan dan kemitraan antara yang sudah maju dengan yang belum berkembang.

Seperti yang disinggung bahwa unsur pemberdayaan itu adalah salah satunya menciptakan para pelaku pasar itu adalah terciptanya suasana kondusif dan keseimbangan ekonomi. Jika dilihat dari iklim

pengembangan masyarakat adalah terciptanya *mainstream* ekonomi masyarakat yang dianggap penting dan efektif dalam memenuhi kebutuhan hidup orang banyak. Sehingga dalam perkembangan, ilmu pengembangan masyarakat memberikan alternatif bagi para pelaku pasar tradisional itu dibagi ke dalam pengembangan ekonomi masyarakat yang konservatif dan pengembangan ekonomi masyarakat radikal.

Dalam pengertian pengembangan ekonomi masyarakat yang konservatif maksudnya adalah menarik industri (baik kerajinan maupun yang lainnya), memulai industri lokal, dan pariwisata. Sedangkan, pengembangan ekonomi masyarakat yang radikal adalah terbentuknya koperasi, bank masyarakat atau *credit unions*, dan LETS (*local employment and trading scheme*) artinya menciptakan mata uang alternatif di tubuh masyarakat itu sendiri.

Memicu dari konsepsi tersebut, pemberdayaan pelaku pasar di pasar tradisional telah terwujud di beberapa pasar tradisional inti. Seperti pasar Bantul, Pasar Niten, dan lainnya telah terbentuk pola kredit bagi masyarakat dalam bentuk *pemberiandana* bergulir, kopreasi, paguyuban pedagang pasar, dan pengentasan kemiskinan di pasar.

d. Koperasi dan Dana Bergulir

Seiring dengan berjalannya perkembangan ekonomi, menarik untuk disimak bahwa dalam menjalankan roda perekonomian suatu bangsa adalah dengan manifesto ekonomi kerakyatan. Salah satu gagasan tentang ekonomi kerakyatan adalah dengan terbentuknya badan

pengelolaan ekonomi yang merakyat yakni koperasi. Hal ini sejalan dengan konsep yang telah ditorehkan oleh Bung Hatta mantan Wakil Presiden era Orde Lama.

Koperasi pada dasarnya adalah sebuah sistem nilai. Nilai-nilai yang diemban oleh koperasi, secara universal, dapat dikenali melalui apa yang disebut sebagai sendi dasar atau prinsip koperasi. Sebagaimana tercantum dalam pasal 5 UU Koperasi No. 25 Tahun 1992, prinsip koperasi meliputi lima hal sebagai berikut: 1). Keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela. 2). Pengelolaan dikelola secara demokratis. 3). Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan jasa usaha masing-masing anggota. 4). Pemberian balas jasa terbatas terhadap modal. 5). Kemandirian.

Kendati demikian, sesuai dengan kelima prinsip tersebut tercatat bahwa koperasi di Kabupaten Sumba Barat Daya ada 445 pada tahun 2011 yang sudah berbadan hukum. Dari data tersebut telah mampu memberikan kontribusi yang cukup baik dilingkungan masyarakat Sumba pada umumnya. Karena, koperasi merupakan produk ekonomi yang disusun guna menciptakan sistem ekonomi kerakyatan. Dengan banyaknya koperasi tersebut dan dipermudah dalam bentuk pelayanan bagi masyarakat, niscaya menjadi sebuah sistem ekonomi daerah yang cukup efektif.

Apalagi sebagian koperasi di Kabupaten Sumba Barat Daya telah mampu masuk ke dalam koperasi unggulan ditingkat Propinsi. Sehingga

sampai saat ini koperasi telah mampu menjadi bagian dalam masyarakat sumba. Lebih dari itu, koperasi telah merembak ke penjuru desa yang biasa disebut KUD. Dalam hal ini sudah barang tentu telah masuk ke pelataran pasar tradisional yang menjadi bagian terpenting dalam pemberian dana pinjaman bagi pelaku pasar yang kekurangan modal. Selain sebagai sebuah sistem nilai, koperasi pun bisa dimanfaatkan dalam hal pengurangan rentenir yang merajalela di lingkungan pasar tradisional.

Kemudian dinas pendapatan dan pengelolaan asset daerah pun bekerjasama dengan dinas Perindagkop dalam mengelola sistem peminjaman keuangan tersebut. Sehingga tidak semata-merta pemerintah dengan langkah konkretnya memberikan secara langsung, namun ada semacam bentuk pendampingan terhadap masyarakat (pelaku pasar). Hal ini digunakan, agar masyarakat tidak serta merta hanya meminta sumbangan. Tapi pemerintah memberikannya dengan bentuk pendampingan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Terutama bagi mereka yang kategori pedagang pasar yang hanya mengandalkan keinginan tanpa adanya modal untuk menopang dagangannya di pasar tradisional.

e. Paguyuban Pedagang Pasar

Dalam mempercepat pengembangan para pedagang pasar tradisional, sesuai dengan asosiasi seluruh Indonesia bahwasanya organisasi pedagang Indonesia di bentuk untuk meningkatkan mutu dan

kualitas dari para pedagang itu sendiri. Dalam hal ini, paguyuban yang ada di pasar tradisional Kabupaten Sumba barat daya telah terdaftar di dalam organisasi nasional tersebut. Selain itu, untuk memudahkan komunikasi antar pedagang dengan pemerintah maka Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) pun menjadi bagian dari masyarakat pelaku pasar di Kabupaten Sumba barat daya itu sendiri.

f. Pengentasan Kemiskinan di Pasar

Kemiskinan sebagai gejala dalam masyarakat sudah dikenal sejak makhluk manusia menghuni bumi, tetapi kesadaran untuk memeranginya guna mewujudkan pemerataan baru mulai berkembang setelah timbul hubungan antar-bangsa dan negara yang sekarang bertambah erat, sehingga juga kita dapat membandingkan mana yang kaya dan mana yang miskin. Sepanjang dapat kita telusuri kembali sejak manusia beragama, kemiskinan sudah diakui ada, dan semua agama juga mengandung perintah.

Kemudian, besarnya kemiskinan dapat diukur dengan atau tanpa mengacu kepada garis kemiskinan. Konsep yang mengacu kepada garis kemiskinan disebut kemiskinan relatif, sedangkan konsep yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan disebut kemiskinan absolut. Kemiskinan relatif adalah suatu ukuran mengenai kesenjangan di dalam distribusi pendapatan, biasanya dapat didefinisikan didalam kaitannya dengan tingkat rata-rata dari distribusi yang dimaksud. Sedangkan, kemiskinan absolut adalah derajat kemiskinan

dibawah, dimana kebutuhan-kebutuhan minimum untuk bertahan hidup tidak dapat terpenuhi.

Pada dasarnya, kemiskinan itu terjadi karena ada faktor yang menghadang dalam diri seseorang itu sendiri. Seperti halnya kendala kemiskinan itu ada dua faktor diantaranya kendala internal dan kendala eksternal. Dimana kendala internal dipengaruhi oleh faktor psikologis dan teologis orang miskin itu sendiri. Sedangkan, faktor eksternal dipengaruhi oleh kendala politis seperti regulasi kebijakan pemerintah, jaringan bagi orang miskin, dan sebagainya.

Menurut pandangan Yusuf Qardhawi kemiskinan disebabkan karena kendala politis itu dipengaruhi oleh faktor ketidakmampuan negara-negara muslim menggunakan sistem Islam secara utuh, baik dalam kehidupan ekonomi, sosial, hukum, maupun politik. Sedang kendala psikologis-teologis adalah adanya pemahaman yang salah dari sebagian umat Islam tentang tawakal dan kepasrahan kepada Allah, menganggap kemiskinan sebagai sarana untuk mendekati diri kepada Allah, menganggap kemiskinan sebagai lambang kesalehan dan kesucian, enggan bekerja karena pasrah dan menghabiskan waktu untuk ibadah, malas bekerja karena memilih-milih pekerjaan atau karena tidak adanya kesempatan dan lain-lain.

Dari konsepsi tersebut, dalam menjalankan agenda pengentasan kemiskinan yang ada di sekitar pasar tradisional maka pemerintah Kabupaten sumba barat daya berdasarkan peraturan bupati nomor 8 tahun

2008 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pedagang pasar, telah berjalan dengan upaya memberikan dana bergilir terhadap pedagang pasar. Hal ini dimulai di beberapa pasar besar seperti pasar wee wulla, pasar wee mangura, pasar kori dan Pasar wee rame. Setelah berjalannya waktu sampai saat ini pengembangan tersebut terus dilakukan ke beberapa pasar lain dengan konsep pemerataan. Agar tidak terjadi ketimpangan antar satu sama lain. Kemudian dalam menggelontorkan dana bergilir ini pemerintah sebenarnya untuk mengantisipasi banyaknya rentenir dikalangan para pedagang pasar.

g. Penataan Dagangan

Dalam hal penataan dagangan dimaksudkan untuk menciptakan dagangan para pelaku pasar terorganisir dan rapi. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa indikasi terhadap pasar tradisional kebanyakan orang selalu berbicara kumuh, bau, sumpek, kotor dan lain-lain. Dari indikasi inilah penataan dagangan di pasar tradisional diperlukan. Selain untuk menciptakan kenyamanan, penataan ini pula untuk memaksimalkan pelayanan bagi para konsumen yang ada dilingkungan pasar.

Lebih dari itu, dengan adanya penataan ini bisa sebagai bentuk pemerataan pendapatan bagi para pelaku pasar maupun pengaturan kesetabilan harga. Apalagi jika melihat diakhir-akhir ini sebelum pemerintah memberikan kebijakan kenaikan harga, barang dagangan dipasar tradisional telah berdampak tersendiri dengan menekankan harga dipasar menjadi lebih tinggi.

h. Pengelolaan Keamanan Pasar

Dalam pengelolaan keamanan pasar pada umumnya dibagi ke dalam dua smp yaitu siang dan malam hari. Pada siang hari penjagaan keamanan dilakukan oleh satpam dengan status PHL atau langsung dari APPSI. Kemudian, dikerjakan oleh pengelola pasar dan swadaya dari pedagang. Para pedagang biasanya membutuhkan bantuan lain dalam pengelolaan keamanan ketika keadaan mendesak. Dalam hal ini bekerja sama dengan pihak pemerintah. Pemerintah daerah Sumba barat daya dalam mengamankan keamanan di sini menurunkan tim Satpol Pamong Praja. Fungsi Satpol PP tidak terlalu signifikan karena keamanan untuk kondisi di pasar tradisional sudah ada masing-masing tugas dari pedagang atau dari masyarakat setempat yang diperbantukan.

Pengelolaan pasar ini diterapkan di masing-masing pasar tradisional di Kabupaten sumba barat daya. Terutama pasar-pasar tradisional yang dikategorikan dalam klaster pertama. Seperti pasar Rada mata, pasar wee wulla dan lain-lain. Dimana sistem pengelolaan pasar tradisional menggunakan semi sistem pasar tradisional. Dengan menggunakan smp antar penjaga keamanan. Sehingga tingkat keamanan menjadi lebih kondusif.

i. Pengelolaan Kebersihan Pasar

Untuk pengelolaan kebersihan pasar pada dasarnya tanggungjawab dari pemerintah yang kemudian pemerintah mempunyai instrument untuk mengurus hal ini. Dalam prakteknya, menyediakan

tempat sampah yang setiap harinya ditarik dan diangkut langsung oleh petugas dari dinas pekerjaan umum (PU). Untuk melancarkan ketertiban kebersihan pun dengan bijaksana pemerintah mewajibkan bagi para pelaku pasar tradisional membayar retribusi sampah per hari setiap kali berjualan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil dari analisis pengelolaan pasar tradisional Wee Wulla di Kabupaten Sumba Barat Daya Berdasarkan hasil penelitian dan mengamati secara langsung maka dapat disimpulkan bahwa Berkaitan rumusan Masalah Yaitu : Peran Pemerintah, Faktor Pendukung dan Penghambat dan Model pengembangan Pasar, Peneliti memperoleh kesimpulan bahwa:

1. Peran Pemerintah dalam pengelolaan Pasar Tradisional

Perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan aset Daerah dalam mengelola pasar tradisional di Kabupaten Sumba Barat Daya seperti :

- a) meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi pasar.
- b) mewujudkan kenyamanan bagi masyarakat, pedagang, pembeli dan pengguna pasar lainnya dengan peningkatan sarana, prasarana dan penataan pasar.
- c) mewujudkan lingkungan pasar yang bersih tertib dan aman dari perencanaan tersebut belum semuanya teralisasi dengan baik.

2. Faktor Determinan

a. Faktor Pendukung

- 1) Adanya Peraturan mengenai Pasar Tradisional dan Pasar Modern
- 2) Adanya kebijakan Revitalisasi pasar tradisional dalam RPJMD
- 3) Pasar Tradisional mempunyai ciri khas dan masih eksis untuk masyarakat Wewewa selatan.
- 4) Tingginya minat masyarakat untuk berdagang

b. Faktor penghambat

Pelaksanaan pengorganisasian yang dilakukan oleh Daerah Tersebut tidak begitu efektif di sebabkan oleh Dinas pendapatan dan Pengelolaan Asset Daerah tidak memiliki kapasitas Potensi yang memadai dalam pengelolaan Pasar di Kabupaten Sumba Barat Daya. Namun dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi yang telah di berikan oleh Bupati Dinas Tersebut Dapat Menghimpun Sedikitnya PAD yang bersumber Dari Retribusi Pasar dan Parkir walau tidak maksimal.

3. Model pengembangan Pasar Tradisional

Adapun Model dalam pengembangan pasar tradisional yaitu Optimalisasi Pembangunan dan– revitalisasi pasar tradisional dengan dilengkapi kemudahan akses bagi pengunjung maupun pedagang Pengembangan pasar– tradisional dengan memanfaatkan potensi dan ciri khas yang dimiliki Pengembangan pasar– tradisional dengan melakukan kerjasama dengan investor Memfasilitasi dan menjamin– kemudahan

peminjaman modal bagi pedagang melalui kerjasama dengan perbankan
Pengembangan pasar– tradisional melalui promosi pasar tradisional
kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi

B. Saran

Dari hasil penelitian ini maka peneliti menyarankan agar:

Pertama, Sebaiknya Pemerintah Daerah tidak Memberikan Pasar pada Dinas Pendapatan daerah dikarenakan kompetensi dan keahlian berdasarkan Tupoksi dari Instansi atau dinas tersebut hanya sebagai penghimpun dan pengelola Pendapatan Daerah (Materi non materi) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Daerah sebaiknya mengatur dan mengkoordinasikan kembali dalam MUSPIDA untuk tugas yang di limpahkan Bupati sehingga Daerah Kabupaten Sumba barat Daya memiliki dinas tersendiri atau UPTD yang mengelola pasar-pasar Tradisional di Kabupaten Sumba Barat Daya.

Kedua, Sebaiknya Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Daerah berinisiatif membuat inovasi-inovasi seperti mengutamakan pasar yang harus diperbaiki terlebih dahulu dan harus mempunyai skala prioritas apa saja yang harus dibenahi dan diperbaiki agar permasalahan di pasar tradisional tersebut berkurang. Sehingga target dalam pembangunan Pasar tradisional tidak hanya menjalankan tugas yang diberikan oleh Pemerintah tetapi berdampak langsung kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adi, Isbandi Rukminto 2013. *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan kajian Pembangunan)*, Depok: Rajawali Pers.

Alfred J.Khan (Sumarnonugroho, 1987:28-35). *Kesejahteraan sosial*

(Adi, 1994: 3-5). *Kesejahteraan sosial*

Arsyad, Lincolin. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Yogyakarta: BPF.

Alderborn, Goran, dan Nystrom, Christer, 1996, *Pharmaceutical Powder Compaction Technology*, 17-18, Marcel Dekker Inc, New York.

Ancevich, John. M, dkk. 2008. *Perilaku dan Manajemen Organisasi*. Jakarta : Erlangga

A. friedlander, walter . 1970. *introduction to social welfare united states. englewood cliffs, new jersey: prentice-hall.*

Coyers, Diana, 1991. *Perencanaan Sosial Di Dunia Ketiga*, Yogyakarta : UGM Press.

Cristenso, 1989. *Administrasi Publik*, Bandung: CV. Alfabeta

Dodi. 2002, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Frediman, 1992. *Pembangunan Alternatif*. Bandung : Mandar maju

Hakim. Lukman EM. 2011. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Ar-Ruzz Media.

Kotler, Philip. Gary Amstrong. (2001). *Dasar-dasar Pemasaran*. Edisi Kesembilan: Jilid Satu. Jakarta : PT Indeks

Malano herman, 2011, *Selamatkan Pasar tradisional* Jakarta. PT. gramedia pustaka utama.

Mikkelsen, 1999, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya- Upaya Pemberdayaan : Sebuah Buku Pegangan Bagi Para Praktisi Lapangan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: Universitas Indonesia Press

Moekijat. 1995. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Mandar Maju

Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (1992 : 16- 20) *Tahap-Tahap Pengelolaan Data*

Moleong, Lexy J, 2001. *metodologi penelitian kualitatif*. Bandung ; PT Remaja Rosdakarya. Oxfard English Decteonari

Napitupulu, Albert. *Masa Depan Pasar Tradisional*. www.google.com [27 Maret 2008]

Nystrom H. (1928) cited in: Harold Howard Maynard, Kenneth Dameron, Carlton John Siegler (1938). *Retail Marketing and Merchandising*. p. 193

Peraturan Presiden RI No. 112 Tahun 2007 Tentang *Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern*

Peraturan Menteri Perdagangan No.70 Tahun 2013 tentang *pedoman penataan dan pembinaan, pusat perbelanjaan, dan toko modern*

Robbins & Coulter. 2007. *Manajemen*. Jakarta : Indeks

Bambang,Suyanto (2005 : 172). *informen penelitian*

Pasolong, Harbani. 2007.*Teori Administrasi Publik*. Bandung :Alfabeta

Prijono, Y.M. & Tjiptoherijanto, P. (1983).*Demokrasi Di Pedesaan Jawa*.

Penerbit Sinar Harapan dan Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi – UI.

Jakarta

Pasolong, Harbani. 1980 *Administrasi dan Management Umum*, Jakarta: Ghalia

Indonesia,

Subarsono AG. 2005. *Konsep, Teori dan Aplikasi*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono, 2006, *Metodologi Penelitian Administrasi*, Bandung: CV.Alfabeta

Suharto, Edi. 2006. *Kebijakan Sosial*, Makalah Seminar. Bandung

Sulistiyani dan Rosidah, 2003, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Graha Ilmu:

Yogyakarta

Sutrisno, 2005.*Konsep Pemberdayaan Masyarakat*.Bandung ; PT Remaja

Taylor, Frederick Winslow. 1974.Scientific Management .jilid kedua,

edisi kedelapan. Jakarta : Salemba Empat.

Terry, George R., Prinsip-prinsip Manajemen, diterjemahkan oleh J. Smith

D.F.M, (Jakarta : Bumi Aksara, 1999)

William J. Stanton, 2000, Prinsip Pemasaran, Edisi Ketujuh, Jakarta: Erlangga.

UNDANG- UNDANG

UU Perdagangan No. 7 Tahun 2014 tentang *pedoman penataan dan pembinaan, pusat perbelanjaan, dan toko modern*

UU No.23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*

UU No.6 Tahun 1974 tentang *ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan social.*

Perbup No. 77 Tahun 2016 tentang *kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja badan pendapatan daerah kabupaten sumba barat daya*

INTERNET

[Http ://sacafirmansyah. Wordpress. Com/2009/partisipasi masyarakat](http://sacafirmansyah.wordpress.com/2009/partisipasi-masyarakat/) diakses pada tanggal 17 september 2016

[Http://ivanaffriani.Wordpress. Com/2009/metode penelitian kualitatif](http://ivanaffriani.wordpress.com/2009/metode-penelitian-kualitatif/) diakses pada tanggal 17september 2016

[Http://kbbi.web.id/tradisional](http://kbbi.web.id/tradisional)

SUMBER LAIN

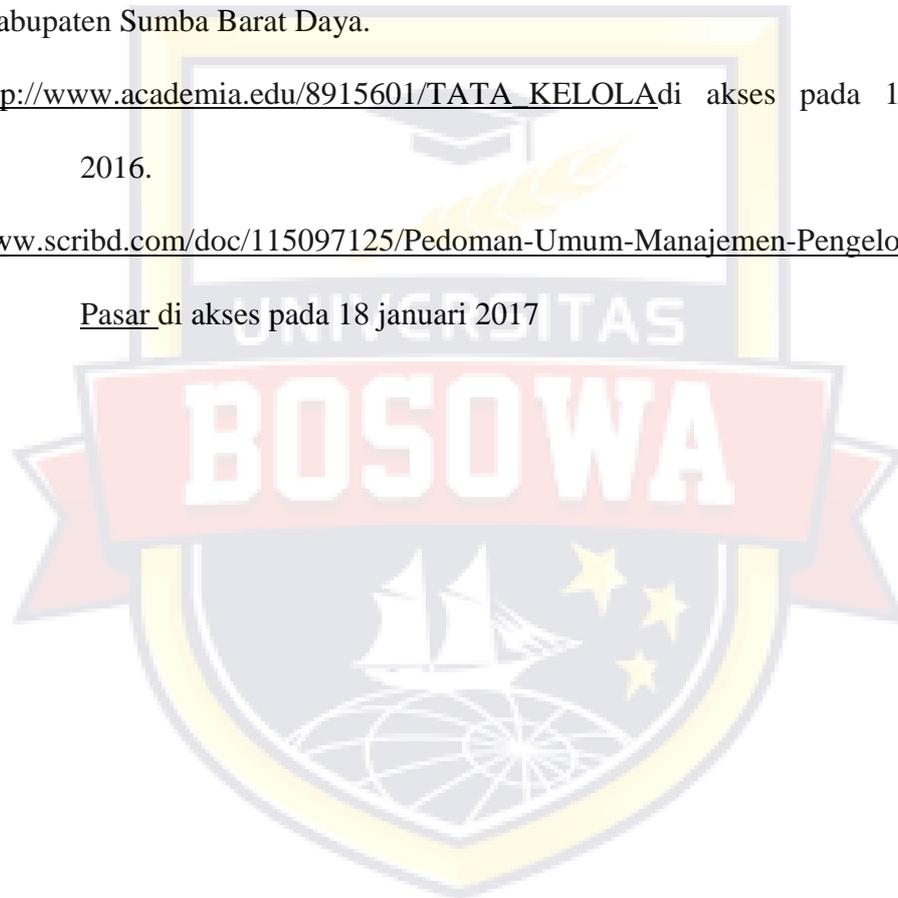
Profi Pasar Tradisional Di Kabupaten Sumba Barat Daya.

Laporan akuntabilitas kinerja instansi dinas pengelolaan pasar tahun 2014.

Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya.

http://www.academia.edu/8915601/TATA_KELOLA di akses pada 12 januari 2016.

www.scribd.com/doc/115097125/Pedoman-Umum-Manajemen-Pengelolaan-Pasar di akses pada 18 januari 2017



Lampiran Dokumentasi Pasar Wee Wulla

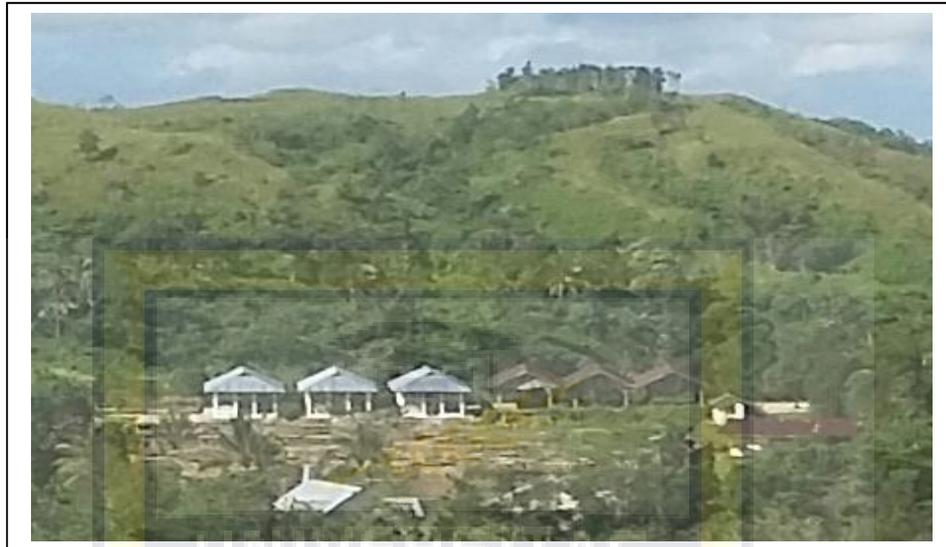


Foto 1. Tampak depan Pasar Wee Wulla, dari atas Bukit



Foto 2. Situasi dan kondisi Hari pasar (Senin dan Kamis) di pasar wee wulla



Foto 3. Wawancara bersama pedagang wee wulla



Foto 4. Kondisi tempat penjualan Ikan